

**BIOGRAFI**  
**TUJUH MENTERI PENDIDIKAN DAN**  
**KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

**OLEH:**  
**GUSTI ASNAN**

**(DISIAPKAN DALAM RANGKA**  
**PENULISAN BUKU SEJARAH TOKOH**  
**MENTERI-MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI)**  
**RENCANA TERBIT 2018**

## --- I ---

### **PROF. DR. IR. R. M. SOEMANTRI BROJONEGORO: MENTERI YANG BELUM SEMPAT MENGABDI BUAT KEMENTERIANNYA**

#### **A. Masa Kecil dan Riwayat Pendidikan**

Raden Mas Soemantri Brodjonegoro dilahirkan pada 3 Juni 1926 di Semarang, Jawa Tengah. Soemantri terlahir dari keluarga berpendidikan. Raden Soetedjo Brodjonegoro, ayahnya Soemantri adalah seorang guru *Hollandsch Inlandsche School* (HIS) di Semarang, setelah itu juga ditunjuk menjadi Kepala Sekolah HIS di Solo. Di samping dikenal sebagai pendidik, Soetedjo Brodjonegoro dikenal sebagai tokoh pergerakan, dia aktivis Partai Indonesia Raya (PARINDRA).<sup>1</sup>

Aktivitas Soetedjo di PARINDRA berlanjut dengan terpilihnya dia sebagai Ketua Departemen Pendidikan. Selepas aktif di PARINDRA, Soetedjo lebih banyak bergelut di dunia akademik dengan capaian akhir sebagai guru besar Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada. Barangkali, aktifitasnya sebagai pendidik, mendorong Soetedjo mendorong anak-anaknya untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Soemantri sendiri mengawali pendidikannya pada usia tujuh tahun. Ia memasuki *Hollandsch Inlandsche School* (HIS) Semarang pada tahun 1933. Selama duduk di bangku HIS, Soemantri tergolong cemerlang, terutama di bidang studi matematika dan fisika. Setamat di HIS, Soemantri melanjutkan pendidikan di *Hogere Burgerschool* (HBS) Semarang, namun ketika ingin menyelesaikan studinya pada tahun 1942 terjadi perubahan yang besar dalam pemerintahan Indonesia. Kekuasaan

---

<sup>1</sup> S. Sumardi, dkk, *Menteri-menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sejak Tahun 1966* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1984).

pemerintah Hindia Belanda diambilalih oleh pemerintahan militer Jepang. Tidak banyak diketahui aktifitas Soemantri sejak masa awal hingga akhir pendudukan Jepang.

- Pada tahun 1945 Soemantri berhasil menyelesaikan pendidikan tingkat SMA Bagian B di Yogyakarta. Sesuai dengan kemampuan dan bakat yang dimilikinya, ia ingin melanjutkan pendidikannya ke *Technische Hoogere School* (THS), atau sekarang dikenal dengan Institut Teknologi Bandung. Ketika kuliah di THS, ia memilih jurusan Chemical Engineering. Namun tidak lama dalam masa kuliah, karena revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari rongrongan kolonials Belanda yang ingin menguasai Indonesia, Soemantri terjun ke medan juang.

Soemantri pun meninggalkan Bandung menuju Yogyakarta. Ia bergabung dalam *Tentara Republik Indonesia Pelajar* (TRIP) pada tahun 1947. Setahun kemudian, ia bertugas di Brigade XVII dengan pangkat kapten. Pada masa revolusi kemerdekaan tersebut, ia pernah menjadi ajudan Kolonel A.H. Nasution yang ketika itu menjadi Panglima Komando Jawa. Setelah perang kemerdekaan berakhir ia mendapat kesempatan melanjutkan pelajaran di *Technische Hoogere School* Delft, Belanda, sebagai mahasiswa tugas belajar dari Angkatan Perang RI.

Semasa kuliah di Belanda, Soemantri memelopori berdirinya perkumpulan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI), yang anggotanya tersebar di seluruh Eropa. Dan, di perkumpulan tersebut Soemantri terpilih sebagai ketua dan ia adalah ketua pertama organisasi itu. Dari *Technische Hoogere School* Delft, ia memperoleh gelar insinyur (1955), dan dari lembaga pendidikan yang sama ia menggondol gelar doktor (1958) dengan judul disertasi *Goschromatography*.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> S. Sumardi, dkk, *Menteri-menteri.....*



Gambar 1 Prof.Dr. RM. Soemantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa awal Orde Baru

Sumber: [http://www.depdiknas.go.id/sejarah/menteri/28\\_sumantribrodjonegoro.jpg](http://www.depdiknas.go.id/sejarah/menteri/28_sumantribrodjonegoro.jpg)

## **B. Karir Soemantri Brodjonegoro**

Setelah menyelesaikan studinya, ia kembali ke tanah air. Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam Universitas Indonesia langsung merekrutnya sebagai staf pengajar. Tidak berselang lama kemudian, Soemantri diangkat sebagai Guru Besar Teknik Perminyakan di Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam. Dan, di sinilah awal kiprahnya mempersiapkan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Dari lembaran sejarah ITB, diketahui bahwa Soemantri Brodjonegoro termasuk dalam Panitia ersiapan Pendirian “Institut Teknologi” di Kota Bandung dan diangkat sebagai Panitera Presidium ITB sejak ITB diresmikan tanggal 2 Maret 1959 hingga tanggal 1 November 1959. Jenjang karirnya di UI sendiri tergolong cemerlang, seperti di bawah ini:

- a. 1958-1964 : sebagai Pembantu Dekan Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam dan Pembantu Rektor UI.
- b. 1964-1972 : sebagai rektor UI dalam dua masa periode jabatan.
- c. 1965-1970 : sebagai Dekan Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam UI.

Seiring dengan berakhirnya era Demokrasi Terpimpin karir Soemantri Brodjonegoro tetap cemerlang. Ia ditunjuk Presiden Soeharto selaku Menteri Pertambangan dalam Kabinet Ampera tahun 1967. Tidak lama kemudian, ia pun

terpilih sebagai Menteri Pertambangan dalam Kabinet Pembangunan I dan Kabinet Pembangunan II serta akhirnya tanggal 28 Maret 1973 sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan hingga akhir hayatnya.

Soemantri meninggal dunia di Jakarta pada 18 Desember 1973 di usia 47 tahun, dan dikuburkan di Kalibata dengan inspektur upacara Wakil Presiden Hamengkubuwono. Kemudian, namanya diabadikan sebagai Gunung di Pegunungan Sudirman, Provinsi Papua yakni Puncak Sumantri Brojonegoro dan stadion olahraga remaja di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, yakni Stadion Soemantri Brodjonegoro dan jalan di Kampus UI Depok.

Masa kepemimpinannya yang relatif singkat menyebabkan tidak banyak jejak ide dan gagasannya dalam bidang pendidikan di kementerian yang dipimpinnya.

## --- II ---

### TEUKU MOHAMMAD SYARIF THAYEB: KONSEPTOR KEBEBASAN AKADEMIK (1974-1978)

#### A. Masa Kecil dan Pendidikan

Teuku Mohammad Syarif Thayeb merupakan putra kelahiran Peureulak, Aceh dan lahir tanggal 7 Agustus 1920. Syarif Thayeb terlahir dari keluarga bangsawan dan memperoleh gelar “teuku” dari ayahnya Teuku Cik Muhammad Thayeb - seorang *uleebalang* (hulubalang) di Peureulak. Sebagaimana diketahui, bahwa dalam lembaran sejarah Aceh, kawasan kelahiran Syarif Thayeb adalah bekas kerajaan yang pernah jaya sebelum kedatangan kolonialis Belanda.<sup>3</sup>



Gambar 1

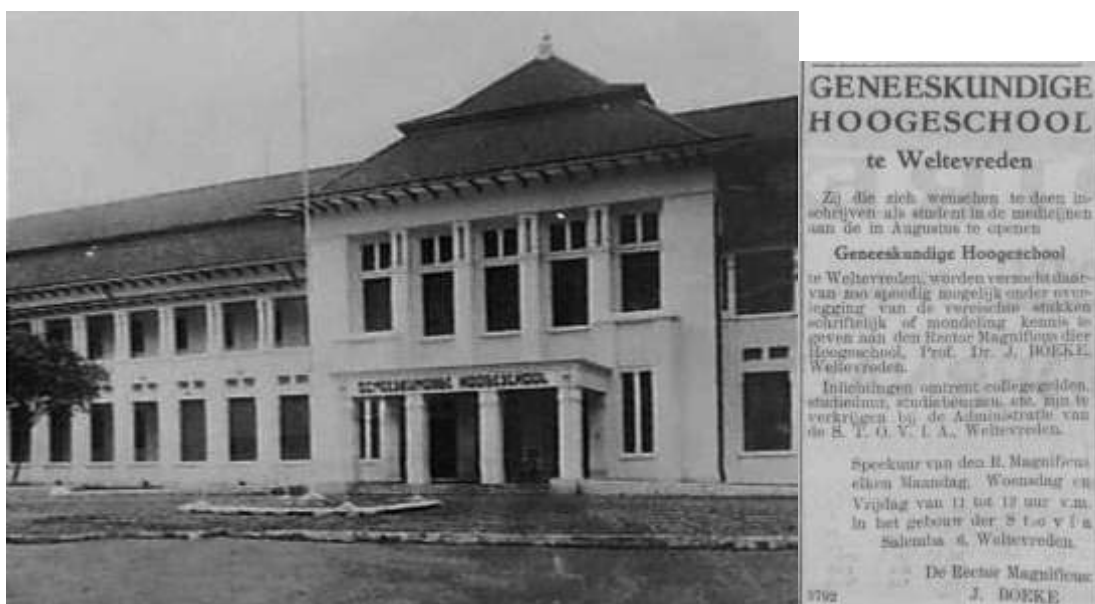
Teuku Cik Mohammad Thayeb yang meninggal tahun 1957 dalam usia 68 tahun.

*Sumber:* <https://www.geni.com/people/Teuku-Tjhik-Hadji-Mohammad-Thayeb/6000000001269681455>

---

<sup>3</sup> Dennys Lombard, *Kerajaan Aceh* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991).

Catatan mengenai masa pendidikannya hanya tercatat ketika ia belajar di *Geneeskundige Hogeschool* di Aceh tahun 1933.<sup>4</sup> Pendidikannya di sekolah lanjutan kedokteran masa kolonial Belanda itu dia selesaikan pada tahun 1938. Sejak mengikuti pendidikan di *Geneeskundige Hogeschool*, Syarif Thayeb aktif dalam gerakan politik untuk Indonesia merdeka namun masih secara sembunyi-sembunyi (gerakan bawah tanah). Hal ini sangat dimungkinkan karena Aceh pada masa itu adalah ladang yang subur bagi tumbuhnya gerakan penentangan terhadap kolonialis Belanda. Karena saat itu penjajah menjalankan politik opresif, dan polisi mata-matanya (*Politieke Inlichtingen Dienst*-PID) bertebaran di mana-mana, maka aktivitas politik secara tidak nyata adalah upaya yang paling mungkin bagi Syarif Thayeb muda. Beralihnya kekuasaan Hindia Belanda ke tangan tentara pendudukan Jepang tahun 1942 tidak membuat Syarif Thayeb mundur dari dunia pergerakan. Dia tetap aktif mengupayakan kebebasan Indonesia dari penjajah sehingga dia beberapa kali ditangkap militer Jepang. Tuduhan yang ditujukan kepadanya karena dianggap berbahaya dan menyebar ujaran kebencian terhadap Jepang.



Gambar 2

*Geneeskundige Hogeschool Batavia* Iklan penerimaan pendaftaran mahasiswa-wa ketika pertama kali dibuka tahun 1927.

Sumber *De Sumatra Post* tanggal 6 Agustus 1927

<sup>4</sup> Goenarso, *Riwayat Perguruan Tinggi Teknik di Indonesia, Periode 1920-1942* (Bandung: Penerbit ITB, 1992).

Pada masa pendudukan Jepang Syarif Tayeb melanjutkan pendidikannya di Ika Dai Gaku Jakarta (Sekolah Tinggi Kedokteran Jakarta). Tidak puas dengan masa pendidikannya, kembali Syarif Thayeb melanjutkan studinya di Harvard Medical School Amerika Serikat tahun 1955. Pendidikan di perguruan tinggi bergengsi di Boston ia rampungkan tahun 1957. Setelah menyelesaikan studinya, kembali ia melanjutkan kuliah di Pediatrics School of Medicine di Philadelphia. Pengakuan terhadap kiprah ilmu dan minat akademisnya tidak hanya didapatnya diujung kuliah yang dijalannya, tetapi juga dia peroleh setelah dia aktif mendarmabaktikan ilmunya di perguruan tinggi dan sebagai pejabat publik. Setamat dari kuliah, setelah kembali aktif di lingkungan TNI (menjadi Kepala Bank dan Laporatorium Darah Angkatan Darat) Syarif Thayeb dipercayai menjadi Kepala Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Cipto Mangunuukusumo) di Jakarta. Selanjutnya dia menjadi dosen pada Fakultas Kedokteran Bagian Anak Universitas Indonesia dan kemudian menjadi Presiden Universitas tersebut, dan setelah itu menjadi Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP). Minat dan pengabdianya yang tinggi pada dunia akademis khususnya da dunia pendidikan pada umumnya mengantarnya menjadi penerima Honoris Causa (Dr. HC.) untuk bidang pendidikan yang dianugerahi oleh Mindanao University Filipina tahun 1967. Dan delapan tahun kemudian, Syarif Thayeb kembali memperoleh Doktor Honoris Causa dari The Philipines Womens University Manila.<sup>5</sup> Tidak hanya menyibukkan diri dengan pendidikan umum yang berhubungan dengan dunia kedokteran, Syarif Thayeb juga tercatat pernah mengikuti pendidikan dalam bidang kemiliteran, yakni pada Sekolah Staf Angkatan Darat (SESKOAD) di Bandung tahun 1970.

## **B. Karir Moh. Syarif Thayeb**

Dunia militer memang menjadi bagian dari sejarah hidup Syarif Thayeb. Aktivitasnya dalam gerakan bawah tanah guna pembebasan Indonesia dari cengkeraman kolonialis (Belanda dan Jepang) menyebabkannya memilih masuk dunia militer pada awal kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Syarif Thayeb memasuki kancah dunia militer melalui jalur Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Latar

---

<sup>5</sup> S. Sumardi, dkk, *Menteri-menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sejak Tahun 1966*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1984).



belakang pendidikan kedokterannya, membawa dirinya ditempatkan sebagai tim medis sejak keterlibatannya dalam perang mempertahankan kemerdekaan itu. Medan perjuangan dokter militer ini berada di Front Surabaya. Syarif Thayeb juga ikut dalam penumpasan pemberontakan Partai komunis Indonesia (PKI) Madiun (1948) dan penumpasan upaya pendirian RMS (Republik Maluku Selatan) (1951). Pascapengakuan kedaulatan hingga tahun 1955 Syarif Thayeb ditugaskan sebagai dokter militer di Komando Militer Kota Besar Djakarta Raja (KMKB-DR) Divisi Siliwangi.

Seperti disebut di atas, tahun 1955 Syarif Thayeb melanjutkan pendidikannya ke Amerika Serikat. Berturut-turut dia mengecap pendidikan di Sekolah Kesehatan Harvard University di Boston (1955-1957) dan Pediatrics School of Medicine Temple University di California (1957-1959). Setamat dari Pediatrics School of Medicine, ia kembali ke Tanah Air dan bekerja kembali di lingkungan militer. Ia didaulat sebagai Kepala Bank dan Laboratorium Darah Angkatan Darat di Jakarta tahun 1959 hingga 1961.

Pada tahun yang sama, Syarif Thayeb menjabat Kepala Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Cipto Mangunkusumo sekaligus dosen senior di Fakultas Kedokteran bagian Anak di Universitas Indonesia. Karirnya terus meroket karena pada tahun 1962 dia ditunjuk menjadi Presiden Universitas Indonesia dan diakhir tahun 1964, ketika Bung Karno membentuk Kabinet Dwikora, Syarif Thayeb diamanahi tugas sebagai Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) (1964-1966).



Gambar 3 Pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Anggota legislatif yang dilantik Presiden Soekarno merupakan pengganti Konstituante yang dibubarkan lewat Dekrit Presiden 5 Juli 1959.  
*Sumber 30 Tahun Indonesia Merdeka Jilid 3*

Memasuki masa transisi dari Demokrasi Terpimpin ke Orde Baru, Syarif Thayeb terpilih sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) tahun 1966-1971. Pasca melepas kesibukannya di DPRGR, ia ditunjuk sebagai Duta Besar untuk Amerika Serikat dan Brazil yang berkedudukan di Washington dari 1971 sampai tahun 1974. Karir Syarif Thayeb di dunia birokrasi terus berlanjut, ketika Presiden Soeharto melantiknya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Januari 1974, menggantikan posisi dari Mendikbud Soemantri Brodjonegoro. Sejak tahun 1976 sampai 1988, pasca turun dari jabatan Menteri P & K, beberapa kali Syarif Thayeb dipromosikan untuk jabatan tertentu, seperti:

- a. Anggota Badan Pelaksana UNESCO tahun 1976-1980.
- b. Chairman of SEAMEC Conference (1977-1978).
- c. dan Anggota DPA (Dewan Pertimbangan Agung) tahun 1978-1983 dan 1983-1988.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> S. Sumardi, dkk, *Menteri-menteri.....*



Gambar 4

Pelantikan Kabinet Dwikora di istana negara pada 24 Februari 1966.

*Sumber 30 Tahun Indonesia Merdeka Jilid 3*

### **C. Pemikiran Syarif Thayeb untuk Pendidikan dan Kebudayaan**

Semasa menjabat Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan pada masa akhir Demokrasi Terpimpin, Syarif Thayeb menjadi salah seorang sponsor berdirinya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Sejak demonstrasi besar-besaran tahun 1966, Syarif Thayeb bersuara lantang tentang kebebasan kampus. Syarif Thayeb mendefenisikan bahwa kebebasan akademis adalah kebebasan berpendapat serta penyampaian ilmu pengetahuan dan teknologi baik secara lisan dan tulisan dalam beberapa forum yang biasa berlaku di Perguruan Tinggi.

Syarif Thayeb mengemban jabatan sebagai Menteri Pendidikan dengan sejumlah persoalan mendasar dalam dunia pendidikan Indonesia. Persoalan ini terjadi pada tingkat pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi. Tiga dari sejumlah persoalan itu yang langsung berhubungan dengan tingkat pendidikan dasar dan menengah adalah perluasan dan pemerataan kesempatan belajar, biaya pendidikan/pembebasan uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), dan mutu

pendidikan.<sup>7</sup> Saat itu masih banyak anak usia sekolah (7 s.d. 12 tahun) yang tidak sempat menikmati pendidikan. Walaupun mereka bisa bersekolah, maka banyak dari mereka yang kemudian tidak mampu menyelesaikan pendidikan, mereka terpaksa keluar sekolah (*drop out*) sebelum memperoleh ijazah. Menurut data yang tersedia saat itu, dari 100 siswa yang masuk kelas 1 hanya sekitar 25 % yang mampu bertahan hingga kelas 6 (lulus). Ada banyak latar belakang yang menyebabkan terputusnya pendidikan mereka, tiga diantaranya adalah kurang tersedianya sekolah tempat mereka belajar (kalapun ada berada di lokasi yang jauh dari rumah atau tempat tinggal dan akses jalan menuju sekolah sangat jelek), keadaan ekonomi orang tua yang tidak memungkinkan mereka bersekolah, apalagi bersekolah di lokasi di luar tempat tinggal mereka), dan diajak atau dipaksanya mereka membantu orang tua untuk bekerja, dengan kata lain, alasan ketiga ini berkaitan erat dengan kurangnya kurangnya dukungan orang tua. Hal ini berhubungan dengan dengan realitas lain yang melilit dunia pendidikan saat itu, yakni masih banyaknya orang dewasa yang belum pernah mengecap pendidikan waktu itu. Salah satu kebijakan yang dijalankan Syarif Thayeb untuk mengatasi kekurangan sekolah ini adalah membangun gedung-gedung sekolah baru yang didanai dengan anggaran yang dialokasikan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) yang dikenal dengan nama SD Inpres (Sekolah Dasar Instruksi Presiden). Pembangunan gedung ini lengkap dengan meubeliernya, kamar kecil, pompa air dan sumur. Hingga dua tahun kepemimpinan Syarif Thayeb (1976) telah dibangun 16.000 gedung dengan 96.000 ruang kelas. Sesuai dengan tujuan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan akan gedung pendidikan, maka SD Inpres dibangun di lokasi-lokasi yang sebelumnya belum memiliki sekolah dan umumnya di kawasan pinggiran dan pelosok.<sup>8</sup> Di samping membangun SD Inpres, pemerintah juga

---

<sup>7</sup> Mela Mita Septiana, "Kebijakan Pendidikan Menteri Syarif Thayeb Tahun 1974-1978", dalam, [journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/risalah/article/download/4931/4593](http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/risalah/article/download/4931/4593)

<sup>8</sup> Ini pulalah yang menyebabkan munculnya pandangan meremehkan di tengah masyarakat saat itu bahwa SD Inpres merupakan sekolah kelas dua, sekolah kampung. Apalagi karena umumnya gedungnya dibangun secara "proyek", maka kualitas gedung umumnya juga jelek. Hal ini kemudian ditambah pula oleh guru yang mengajar di sana yang juga dipersiapkan dengan program khusus sehingga kemampuan mereka juga kurang dengan guru-guru yang telah mengabdikan sebelumnya.

memberikan bantuan untuk rehabilitasi SD negeri dan swasta serta madrasah ibtidaiyah.<sup>9</sup>

Masalah ekonomi yang melilit sebagian besar siswa disebabkan oleh adanya kewajiban siswa untuk membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Untuk menjalankan aktivitas pendidikan, pemerintah RI membebani siswa dengan SPP. SPP ini dikenakan kepada seluruh peserta didik, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Era kepemimpinan Syarif Thayeb mewarisi sistem yang secara yuridis diperkenalkan oleh pemerintah sejak tahun 1968. Dalam kenyataannya, dalam proses belajar mengajar, peserta didik sesungguhnya tidak hanya membayar SPP semata, tetapi juga sejumlah biaya lain, seperti bahan pelajaran (buku dan alat tulis), biaya ekstra kurikuler, dlsbnya. Di samping itu, keadaan ekonomi negara yang masih belum stabil pascaperubahan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru juga membuat biaya hidup menjadi sangat tinggi.

Syarif Thayeb menyikapi persoalan ini dengan mengeluarkan Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Tidak tanggung-tanggung, saat itu dikeluarkan tiga Surat Keputusan sekaligus, yaitu SK Bersama No. 0257/K/1974, No. 221 tahun 1974 dan No. 1606/MK/1/11/1974 Tentang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Ada tiga pokok pemikiran yang paling penting dari ketiga SK tersebut, pertama SPP adalah satu-satunya sumbangan yang diperbolehkan untuk dipungut oleh sekolah atau perguruan tinggi. Kedua, keringanan yang dapat diberikan atau pembebasan dari kewajiban membayar SPP berdasarkan persetujuan Bupati Kepala Daerah Tingkat II. Ketiga, untuk perguruan tinggi pembebasan atau keringanan diberikan atas usul pimpinan fakultas berdasarkan pertimbangan senat perguruan tinggi bersangkutan.<sup>10</sup> Di samping itu, pemerintah juga menyediakan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi namun kurang beruntung secara ekonomi. Dalam kurun waktu 1974-1975 telah diberikan beasiswa kepada 3046 siswa sekolah dasar, lanjutan dan perguruan tinggi dengan jumlah dana yang diberikan sebesar Rp. 20.523.000,- Pada tahun 1975-1976 diberikan beasiswa kepada 7.757 peserta didik dengan jumlah dana

---

<sup>9</sup> Suradi H.P. et al., *Sejarah Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986), hal. 222.

<sup>10</sup> Suradi H.P. et al., *Sejarah Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan*, hal. 223.

sebesar Rp. 52.799.000,- Terlihat peningkatan yang signifikan dalam jumlah penerima beasiswa serta jumlah dana yang dialokasikan oleh pemerintah dalam dua tahun ajaran ini. Dari data yang disajikan terlihat bahwa penerima beasiswa yang terbesar adalah siswa Sekolah Dasar. Dalam tahun ajaran 1974-1975 jumlah mereka yang menerima beasiswa sebanyak 1.269 orang dan tahun ajaran 1975-1976 jumlah meningkat menjadi 3.247 orang. Siswa SD yang mendapat beasiswa khususnya untuk siswa kelas V dan kelas VI. Di samping siswa Sekolah Dasar, beasiswa juga diberikan kepada siswa SMP, SMEA, ST, SKKP, SMA, STM, SKKA, SPG, SMOA, SPSA, SPIK, dan Perguruan Tinggi (universitas dan institut keguruan).<sup>11</sup>

Pembangunan gedung sekolah baru, khususnya SD Inpres, berdampak kepada peningkatan peserta didik. Pada era Syarif Thayeb pemerintah memperkirakan akan terjadi lonjakan peserta didik pada jenjang sekolah dasar sebanyak 7,5 juta orang. Peningkatan jumlah siswa dan pembangunan gedung sekolah membutuhkan ketersediaan guru yang akan mengajar. Setelah dikalkulasikan antara jumlah sekolah yang dibangun dan peningkatan jumlah peserta didik selama kepemimpinan Syarif Thayeb maka didapatkan angka kebutuhan guru sebanyak 525.000 orang. Artinya saat itu terdapat kekurangan guru sebanyak 100.000 orang, karena jumlah guru SD saat itu lebih kurang 425.000. Angka 100.000 orang ini belum termasuk adanya guru yang pensiun dan meninggal yang jumlahnya diperkirakan mencapai 89.000 selama era Syarif Thayeb. Oleh karena itu, Syarif Thayeb mengupayakan penambahan jumlah guru SD, setidaknya sebanyak 38.000 orang setiap tahun. Penambahan ini diupayakan melalui jalur Sekolah Pendidikan Guru (SPG). Sehubungan dengan itu, jumlah SPG ditambah dengan peningkatan daya tampung dan pembangunan gedung baru. Direncanakan selama era Syarif Thayeb akan dikembangkan sebanyak 66 SPG. Pengembangan SPG masih dirasa belum mampu memenuhi kebutuhan akan tenaga guru. Diperkirakan SPG hanya akan mampu menghasilkan 13.000 lulusan. Karena itulah diadakan berbagai paket pendidikan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan guru itu. Di samping itu juga dibangun 1 Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB). Memang, pada era Syarif Thayeb, perhatian terhadap anak

---

<sup>11</sup> Suradi H.P. et al., *Sejarah Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan*, hal. 224-225.

usia sekolah yang berkebutuhan khusus semakin mendapat perhatian oleh pemerintah. Karena itulah, ada masa kepemimpinannya ini direncanakan pembangunan lembaga pendidikan yang khusus mendidik calon guru di sekolah-sekolah di mana pesertanya mesti mendapat perhatian dan dididik secara istimewa.

Untuk anak-anak yang putus sekolah dan tidak mampu (atau tidak ingin bersekolah secara resmi lagi) disediakan pendidikan luar sekolah. Pendidikan ini dilaksanakan dalam berbagai paket kursus kilat dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan. Lembaga yang khusus disertai tanggungjawab menyelenggarakan pendidikan ini adalah Pusat Pelatihan Pendidikan Masyarakat (PPLM). Tujuan utama dari pendidikan corak ini adalah memberikan berbagai keterampilan yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk terjun ke tengah masyarakat nantinya. Kegiatan ini terbuka bagi setiap anggota masyarakat yang ingin menambah keterampilan atau kepada mereka yang belum pernah mendapat kesempatan mengenyam pendidikan secara formal.<sup>12</sup>

Kebijakan pendidikan lainnya yang dijalankan Syarif Thayeb adalah penyempurnaan kurikulum. Sebagaimana dinyatakan dalam latar belakangnya, kurikulum ini dikeluarkan karena kurikulum yang (Kurikulum 1968) dirasa tidak mampu lagi menjawab tantangan zaman akibat berbagai perubahan yang terjadi akibatnya lajunya pembangunan nasional. Hal ini antara lain disebabkan oleh setidaknya lima faktor utama, yakni: 1). Selama Pelita I, yang dimulai pada tahun 1969, telah banyak timbul gagasan baru tentang pelaksanaan sistem pendidikan nasional; 2). Adanya kebijaksanaan pemerintah di bidang pendidikan nasional yang digariskan dalam GBHN yang antara lain berbunyi : “Mengejar ketinggalan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mempercepat lajunya pembangunan; 3). Adanya hasil analisis dan penilaian pendidikan nasional oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mendorong pemerintah untuk meninjau kebijaksanaan pendidikan nasional; 4). Adanya inovasi dalam sistem belajar-mengajar yang dianggap lebih efisien dan efektif yang telah memasuki dunia pendidikan Indonesia; 5). Keluhan masyarakat tentang mutu lulusan pendidikan untuk meninjau sistem yang kini sedang berlaku.

---

<sup>12</sup> Mela Mita Septiana, “Kebijakan Pendidikan Menteri Syarif Thayeb....”, hal. 10-11.

Prinsip pelaksanaan Kurikulum 1975 antara lain berorientasi pada tujuan, menganut pendekatan integratif dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif, menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu, menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI). Sistem yang senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik, dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa, dipengaruhi psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus respon (rangsang-jawab) dan latihan (*drill*). Pembelajaran lebih banyak menggunakan teori behaviorisme, yakni memandang keberhasilan dalam belajar ditentukan oleh lingkungan dengan stimulus dari luar, dalam hal ini sekolah dan guru.

Ada sepuluh mata pelajaran yang ditentukan dalam kurikulum ini, yaitu 1). Pendidikan agama; 2). Pendidikan Moral Pancasila; 3. Bahasa Indonesia; 4). Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS); 5). Matematika; 6). Ilmu Pengetahuan Alam (IPA); 7). Olah raga dan kesehatan; 8). Kesenian; 9). Keterampilan khusus.

Untuk mendukung pelaksanaan kurikulum yang diperkenalkan tersebut, maka pada tahun ajaran 1975/1976 pemerintah menyiapkan (mencetak) sebanyak 318.250 buku dan untuk tahun ajaran 1977/1978 direncanakan penyediaan buku sebanyak 30.000 naskah dengan jumlah halaman dalam kisaran 180 halaman tiap buku.

Tidak hanya dalam pendidikan dasar dan menengah (lanjutan), Syarif Thayeb juga menaruh perhatian yang besar bagi pendidikan tinggi. Sehubungan dengan itu, sekitar satu tahun setelah dilantik menjadi menteri, Syarif Thayeb membentuk Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di kementeriannya. Tugas pokok lembaga yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri P dan K, Nomor 0140/U/1975 tanggal 12 Juli 1975 ini adalah menangani dan membina bidang akademik, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, perguruan tinggi negeri dan swasta serta kemahasiswaan. Seperti disebut pada bagian lain buku ini, sejak tahun 1961 pengelolaan pendidikan tinggi diurus oleh suatu kementerian khusus yang dinamakan Departemen Perguruan tinggi dan Ilmu Pengetahuan disingkat Departemen PTIP. Keberadaan lembaga itu menyebabkan penanganan pendidikan tinggi menjadi terpisah dari urusan pendidikan dasar dan menengah. Memasuki tahun 1974, pengelolaan pendidikan tinggi menyatu kembali dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.



Dan seperti disebut di atas, tahun 1975 berdasarkan keputusan Mendikbud dibentuk secara resmi Dirjen Dikti.

Pada tahun yang sama, berdasarkan Keputusan Mendikbud, juga ditetapkan Pelaksanaan Pola Kebijaksanaan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi di Indonesia. Konsep pemikiran yang mendasari pengembangan pendidikan tinggi tersebut antara lain: 1). Pembinaan serta pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia harus berdasarkan kepada UUD 1945 dan Tap MPR; 2). Azas-azas Tridharma Perguruan Tinggi dalam hikmat kebebasan akademik yang bertanggung jawab. Di samping itu juga perlu diperhatikan hasil-hasil yang telah dicapai oleh penyelenggaraan pendidikan selama ini, harapan keluarga, masyarakat dan pemerintah terhadap pendidikan sebagai suatu keseluruhan dan terhadap pendidikan tinggi khususnya, implikasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika dan prospektif perkembangan kebudayaan nasional. Dengan kata lain, pengembangan pendidikan tinggi ditujukan pada suatu sistem pendidikan yang menyeluruh yang meliputi seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta.

Kebijakan lain yang diterapkan pada masa kepemimpinan Syarif Thayeb adalah pembentukan Sekretariat Kerjasama Antar Lima Universitas (SKALU). Ini adalah sistem penerimaan mahasiswa baru. Rancangan ini dilaksanakan tahun 1976. Dalam sistem ini lima universitas ternama di Indonesia saat itu, yaitu Universitas Indonesia (Jakarta), Institut Teknologi Bandung (Bandung), Institut Pertanian Bogor (Bogor), Universitas Gajah Mada (Yogyakarta), dan Universitas Airlangga (Surabaya) menyelenggarakan ujian masuk secara bersama. Melalui ujian bersama ini para calon tidak perlu melakukan perjalanan jauh mendatangi perguruan tinggi untuk mengikuti seleksi masuk di berbagai universitas atau institut yang akan dimasuki. Sistem ini jelas akan menghemat biaya dan waktu bagi calon mahasiswa, walaupun disadari pula, sistem ini menghambat kesempatan calon mahasiswa untuk memilih lebih dari satu perguruan tinggi yang disukai.

Pada saat pertama kali diselenggarakan sistem SKALU memberi kesempatan kepada calon mahasiswa untuk memilih nama perguruan tinggi yang diminati saja. Jadi pemilihannya masih sangat umum. Namun pada tahun 1977 sistem ini disempurnakan dengan mewajibkan calon mahasiswa memilih program studi (fakultas) yang ingin dimasuki.



Gambar 2 Menteri P & K Mohammad Syarif Thayeb periode 1974-1976.

*Sumber* [http://www.depdiknas.go.id/sejarah/menteri/21\\_teukusyarifthayeb.jpg](http://www.depdiknas.go.id/sejarah/menteri/21_teukusyarifthayeb.jpg)

Berkenaan dengan dunia mahasiswa, era kepemimpinan Syarif Thayeb juga di ditandai dengan pembenahan kebedaaan lembaga-lembaga kemahasiswaan, baik Dewan Mahasiswa di tingkat universitas atau Senat Mahasiswa di tingkat fakultas. Lembaga-lembaga kehasiswaan ini diarahkan fungsinya untuk melayani kebutuhan mahasiswa. Dalam bahasa politik saat itu, keberadaan kedua lembaga ini “perlu dibina” bagi peranan yang lebih besar bagi pembangunan nasional.

Di samping mendapat kesempatan menimba ilmu pengetahuan di universitas dan instrutut, era Syarif Thayedb juga ditandai dengan adanya gerakan pembinaan generasi muda melalui pengenalan warisan budaya yang bersifat Bhineka Tunggal Ika. Setelah mengenal warisan budayanya, generasi muda perlu diberi penghayatan nilai budaya bangsa. Selain itu, juga ditempuh lewat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> S. Sumardi, dkk, *Menteri-menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sejak Tahun 1966*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1984.

Strategi lainnya yang bisa ditempuh dalam pengenalan budaya, lanjut Syarif Thayeb adalah meningkatkan daya adaptasi, inovasi, dan kreasi generasi muda terhadap tantangan perkembangan masyarakat, maupun unsur kebudayaan dari luar negeri. Output dari kegiatan ini adalah pewarisan nilai-nilai budaya pada generasi berikutnya.

Untuk mewujudkan pewarisan nilai budaya, terutama untuk anak didik – pembinaannya berada di tangan guru. Bila guru sendiri telah gagal dalam mentransfer pengetahuan kepada kalangan terdidik, masa depan negara dan bangsa dalam kacamata Syarif Thayeb berada dalam jurang kehancuran. Sehingga pada masa akhir kepemimpinan Bung Karno tersebut, ia menginginkan pendidikan di Indonesia mampu menjamin masa depan generasi muda yang gemilang. Hanya melalui pendidikan saja, tambahanya untuk mencerdaskan dan mewariskan budaya bangsa.

Pengenalan *Tut Wuri Handayani* digalakkan kembali oleh Syarif Thayeb semasa ia menjabat sebagai Menteri Kebudayaan pasca meninggalnya Soemantri Brodjonegoro. Pada masa jabatannya ada beberapa masalah pokok yang dihadapi putra kelahiran Aceh tersebut. Pertama, meningkatnya daya tampung anak sekolah untuk semua jenjang pendidikan. Kedua, untuk meringankan beban biaya pendidikan, khusus untuk kelas I sampai III, siswa dibebaskan dari biaya SPP untuk Sekolah Dasar. Sedangkan untuk PT, Menteri P & K melahirkan kebijakan untuk memperbanyak jenis beasiswa khusus untuk kalangan mahasiswa yang tidak mampu.

Ketiga, peningkatan mutu pendidikan sudah digarap sistematis pada semua tingkatan pendidikan. Untuk meningkatkan mutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan penataran untuk dosen dan guru; penyempurnaan alat fasilitas pendidikan dengan pemikiran dan pendekatan inovatif. Keempat, mendirikan sekolah kejuruan STM Pembangunan Politeknik dan menyempurnakan kurikulum Fakultas Keguruan Ilmu Teknik (FKIT) merupakan usaha peningkatan relevansi pendidikan di Indonesia.

Khusus untuk pelajar dan mahasiswa yang belajar di Luar Negeri, Syarif Thayeb dan Menteri Luar Negeri Adam Malik mengeluarkan Surat Keputusan Bersama. Dalam keputusan bersama tersebut, disebut:<sup>14</sup>

- a. Mereka yang akan belajar di luar negeri, khususnya ditentukan Menteri P&K setelah memperoleh pertimbangan dari Dirjen Dikdasmen dan Tim Pembantu Pelaksana Asimilasi di bidang Pendidikan dan Pengaturan Pendidikan Asing di Indonesia, dengan mengutamakan bagi mereka yang memerlukan pendidikan luar biasa yang belum dapat diperoleh di Indonesia.
- b. Bagi mereka yang belajar di luar negeri, akan dibina secara intensif dalam rangka pembinaan kesadaran nasional dan pelaksanaan program asimilasi khususnya. Pembinaan pelajar diserahkan kepada perwakilan RI setempat. Pelajar Indonesia yang berada di luar negeri harus diusahakan segera pulang ke Tanah Air untuk mengikuti sistem pendidikan nasional.
- c. Sebelum berangkat ke luar negeri, setiap siswa harus belajar Santiaji Pancasila.

Aturan tersebut dimaksudkan untuk menjaga seluruh mahasiswa yang berangkat ke Luar Negeri jangan sampai terpengaruh ideologi terlarang dan tidak sesuai dengan keindonesiaan. Selain itu, SKB bertujuan untuk membina pelajar Indonesia di Luar Negeri, dengan tujuan agar lulusan itu nantinya masuk dalam koridor sistem pendidikan nasional. Kegiatan lain yang pernah dilakukan pada masa kepemimpinannya adalah:

1. Ketua Konferensi Pediatrics Asia Afrika.
2. Ketua Pendidikan Tinggi Asia Tenggara (ASA IHL).
3. Anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan
4. Ketua Pembangunan Provinsi Aceh.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> SKB No. SP 562/B.U/X/76/01 dan No.0263/U/1976

<sup>15</sup> S. Sumardi, dkk, *Menteri-menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sejak Tahun 1966*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1984.

### **--- III ---**

**PROF. DR. DAOED JOESOEF: PENGGAGAS NKK/BKK (1978-1983)**

#### **A. Masa Kecil dan Pendidikan**

Daoed Joesoef, demikian nama lengkap Menteri P&K pada Kabinet Pembangunan III yang lahir di Medan tanggal 8 Agustus 1926 ini. Dilihat dari usia hidupnya, dia tergolong mantan menteri yang diberi umur panjang. Daoed Joesoef meninggal di Jakarta tanggal 23 Januari 2018 dalam usia 91 tahun.<sup>16</sup> Daoed Joesoef dilahirkan dari pasangan Moehammad Joesoef dan Siti Jasiah asal Jeron Beteng, Yogyakarta.

Dari beberapa literatur yang tersedia tidak diketahui pasti mengenai sosok kedua orang tua dari Daoed. Namun, keberadaan kedua orang tuanya pernah dia abadikan dalam sebuah novel yang terkenal, berjudul *Emak*. Ayahnya sendiri adalah mantan jawara yang kesehariannya diisi dengan kegiatan memerah susu sapi, sedangkan Siti Jasiah adalah ibu rumah tangga yang sederhana, pintar memasak, dan kreatif.

Pasangan Muhammad Joesoef dan Siti Jasiah, hanyalah orang kampung yang buta huruf dan tidak berpendidikan formal. Namun kemampuannya membaca huruf Arab dengan baik serta pemahaman agama dan Al-Quran yang mendalam menjadi bekal yang kuat dalam mendidik anak-anaknya.

Daoed adalah anak keempat dari lima bersaudara yang bermukim di pinggir hutan Medan. Dia tidak banyak mengulas ingatannya terhadap 3 kakak perempuan dan 1 orang adiknya. Bahkan, pamannya - seorang aktivis pergerakan di Medan, karena dianggap mengacaukan *rust en orde*, kemudian dihukum buang ke Boven Digoel - malah lebih membekas disanuribarnya dan dikatakannya lebih berpengaruh dalam pembentukan dirinya.

Ingatannya pada sosok Siti Jasiah, dia abadikan diusia 77 tahun. Dalam usia yang kebanyakan sudah mengalami kepikunan, Daoed Joesoef malah menulis falsafah hidup ibunya - seorang perempuan kampung yang cenderung terbelakang dalam urusan pendidikan, namun unggul dalam pemahaman keagamaannya.<sup>17</sup> Dalam tulisannya, Daoed menulis kisah menarik dari kegigihan Siti Jasiah yang ingin belajar naik sepeda, sementara Sang Suami sendiri tidak mengizinkan isterinya.

“Nik, kita ini tidak muda lagi,” kata bapak sejenak kemudian.

“Sejak kapan ada pembatasan umur untuk berkeretangin?” sambut emak.

---

<sup>16</sup> *Tempo*, tanggal 24 Januari 2018.

<sup>17</sup> Daoed Joesoef, *Emak. Penuntunku Dari Kampung Darat Sampai Sorbonne* Jakarta: Kompas, 2010.

“Saya lihat nyonya-nyonya Belanda yang lebih tua daripada saya naik keretangin ke sana-ke mari. Dan badannya gemuk-gemuk lagi”. “Ya itulah, mereka lain sih...”.

“Lain bagaimana? Mereka dan kita sama-sama manusia. Bedanya kan cuma di warna kulit. Akan saya buktikan bahwa saya pun bisa berkeretangin seperti perempuan-perempuan Belanda itu”<sup>18</sup>



Gambar 1

Daoed Joesoef dalam acara malam anugerah sayembara Novel Dewan Kesenian Jakarta di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki Jakarta tanggal 9 Maret 2007.

Sumber: *Tempo*, tanggal 9 Maret 2007.

Siti Jasiah sendiri tidak peduli, dan tetap kukuh pendiriannya. Ayah Daoed sebenarnya beralasan, khawatir isterinya menjadi bahan gunjingan isteri tetangga. Ia tetap pada pendiriannya, malah ia berujar, “Biarkan perempuan-perempuan sini menggunjing di belakang saya. Heran, kok mereka begitu benci pada kemajuan. Picik bagai katak di bawah tempurung”.

Rasa sayangnya kepada sang ibu memang dalam. Ia tidak malu-malu menyebut sosok Siti Jasiah lah yang membentuk karakternya. Meski keluarga Daoed Joesoef tinggal di pinggir hutan di Medan, namun ia merasakan sosok ibunya sebagai pengayom dan teladan. Di halaman dua *Emak*, Daoed Joesoef menulis, “Aku tahu benar bahwa prestasi seperti ini adalah berkat perbuatan banyak orang. Barisan orang-orang ini ternyata cukup panjang dan di ujung permulaannya tegak berdiri

---

<sup>18</sup> *Kompas*, 24 Maret 2018.

seorang perempuan bertubuh langsing, semampai, dengan penampilan yang anggun dan wajah mencerminkan ketinggian budi. Perempuan tersebut adalah ibuku, yang menurut kebiasaan di daerah kelahiranku, biasa kusebut emak.”.



Gambar 2

*Emak Penuntunku dari Kampung Darat Sampai Sorbonne*. Karya Daoed Joesoef ini telah beberapa kali terbit, sejak Aksara Kurnia menerbitkannya tahun 2003.

Sumber: Joesoef, 2010.

Masa kecil hingga remaja Daoed Joesoef memang lebih banyak dihabiskan di kota Medan. Pendidikan dasarnya dia lalui di bangku *Holland Inlandsche School* (HIS) Medan. Pendidikan di sekolah itu dia rampungkan tahun 1939. Sejak duduk di HIS, Daoed Joesoef sudah mahir dalam seni melukis. Emaknya pun harus merogoh kocek cukup dalam, sekadar membeli peralatan melukis. Keahlian ini nantinya, dimanfaatkan Daoed Joesoef mencari uang di perantauan.<sup>19</sup>

Setelah menamatkan HIS, dia melanjutkan studi di *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO) di kota yang sama. Namun, karena pada pertengahan 1942 kekuasaan beralih ke tangan militer Jepang, maka Daoed Joesoef menyelesaikan pendidikannya di lembaga pendidikan yang saat itu dinamai MULO *Tjuu Gakko* Medan. Dia menamatkan pendidikan itu tahun 1944. Tidak diketahui jelas, siapa

---

<sup>19</sup> *Kompas*, 8 Agustus 2016.



yang membiayai pendidikannya, mengingat kedua orang tuanya bukanlah dari kalangan yang berkecukupan, apalagi dalam suasana serba-susah pada zaman Jepang.

Memasuki masa awal kemerdekaan Daoed Joesoef terjun ke medan juang dan terdaftar sebagai militer aktif dengan pangkat Letnan Muda. Sampai akhir 1946, dia aktif di Divisi IV Sumatera Timur. Pada tahun 1950, dia dipindahkan ke Komando Militer Pangkalan Jakarta Raya. Karirnya di dunia militer berkembang pesat, sampai dia diangkat sebagai anggota Tim Penasehat Irjenterpra/ Asisten Urusan AD Penguasa Perang Tertinggi periode 1959-1960.<sup>20</sup> Setelah itu, ia mengundurkan diri dari dunia militer dengan pangkat terakhir Letnan Dua.

Selama bermukim di Jakarta, Daoed Joesoef melanjutkan studinya ke Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Pada tahun 1956, Daoed melakukan riset di Jawa Tengah, dengan judul “Gerakan dan Pemberontakan Koperasi”. Daoed Joesoef memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 1959. Setelah itu, dia meneruskan studinya di Program Master, Universite de Paris I Pantheon-Sorbonne, Perancis tahun 1960.<sup>21</sup>

Ketika sedang berjibaku menyelesaikan pendidikannya di Sorbonne Univeristy, Daoed dikejutkan dengan meninggalnya Siti Jasiah. Sejak berpulangnya Siti Jasiah, dia mempercepat merilis kisah *Emak* yang kemudian diterbitkan untuk kali pertama tahun 2003. Khusus di bagian Epilog, Daoed Joesoef panjang lebar mengisahkan sosok ibunya, “Alangkah bahagianya mempunyai emak. Dia yang membesarkan aku dengan cinta keibuan yang lembut. Dia yang selalu memberikan aku pedoman di dalam perjalanan hidup. Dia yang, di setiap langkah, tahap dan jenjang, membisikkan padaku dalam usahaku mengolah budaya kreatif, baik yang terpaut pada ilmu pengetahuan maupun yang menyangkut dengan seni. Dia yang tidak pernah mengecewakan, apalagi menyakiti hatiku. Satu-satunya duka yang disebabkan adalah ketika dia harus pergi meninggalkan aku untuk selama-lamanya”.

Kematian ibunya, tidak membuat Daoed larut dalam kesedihannya. Dia segera merampungkan dua gelar doktor, yakni pada bidang Ilmu Keuangan Internasional

---

<sup>20</sup> S. Sumardi, dkk, *Menteri-menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sejak Tahun 1966*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1984.

<sup>21</sup> *Kompas*, 25 Januari 2018.

dan Hubungan Internasional tahun 1965, serta Ilmu Ekonomi pada 1973 di Universite de Paris I, Pantheon-Sorbonne, Perancis. *Kompas* tanggal 8 Agustus 2016 menyebut, bahwa Daoed Joesoef adalah orang pertama Indonesia yang mempelajari ilmu ekonomi di lembaga pendidikan tinggi Perancis dan orang Indonesia pertama yang memperoleh gelar *Doctorat d'Etat* atau doktor negara, lebih tinggi dibandingkan dengan *Doctorat d'Universite* atau doktor universitas dari Universitas Sorbonne.

## B. Jenjang Karir

Ketika masih berstatus mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Daoed Joesoef yang kuat dalam bidang Ekonomi Moneternya tersebut sempat ditawari ditawari untuk menjadi Gubernur Bank Indonesia, menggantikan Sjafruddin Prawiranegara. Peristiwa itu terjadi tahun 1953.<sup>22</sup> Tawaran itu ditolaknya dengan alasan independensi. Menurut Daoed Joesoef, dia tidak akan lagi bebas berkarya dan menulis jika menjadi Gubernur BI. “Saya menolak karena jika saya masuk BI, saya tidak lagi bebas menulis dan berpikir. Segala tulisan harus dikonsultasikan dengan atasan,” ujar Daoed Joesoef.



Gambar 3

---

<sup>22</sup> *Kompas*, tanggal 28 Januari 2018.

Menteri Daoed Joesoef dalam acara pameran dan bazar buku tahun 1980.

Sumber: *Tempo*, tanggal 7 Januari 1980.

Pada tahun 1956, karena kecemerlangan akademiknya, Daoed Joesoef telah ditunjuk menjadi asisten dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Setahun menjelang merampungkan skripsinya, pada tahun 1958, Daoed Joesoef telah diangkat sebagai dosen di fakultas yang sama. Keahliannya di bidang Ekonomi Moneter dan Perhitungan Pendapatan Nasional, juga membawa Daoed Joesoef sebagai dosen terbang di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.

Karir strukturalnya di dunia akademik segera melesat. Beberapa kali di Fakultas Ekonomi, nama Daoed Joesoef tercatat sebagai kepala departemen dan ketua jurusan. Itu semua terjadi dalam kurun waktu antara 1962-1965. Beberapa jabatan yang pernah disandangnya adalah:

- a. Kepala Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1962-1965.
- b. Kepala Jurusan Umum Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1962-1965.
- c. Kepala Jurusan Umum dan Ekonomi Pemerintahan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1964-1965, dan
- d. Kepala Departemen Administrasi Umum Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1964- 1965.

Sejak merampungkan studinya di Sorbonne, Daoed Joesoef kembali mengabdikan di almamaternya. Kecemerlangan akademik Daoed Joesoef di bidang ekonomi, segera dimanfaatkan pemerintah Orde Baru untuk merekrutnya masuk dalam Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Kisah keterlibatannya dalam CSIS, bermula pada 1969. Pada waktu itu Sofjan Wanandi ditugasi Ali Moertopo (saat itu Asisten Pribadi Bidang Khusus Presiden Soeharto) untuk berkeliling Eropa. Sofjan menemui tokoh-tokoh intelektual muda Indonesia di sejumlah kota di Eropa. Salah satunya, Daoed Joesoef, yang saat itu Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Perancis. Sofjan tertarik dengan kecerdasan dan kekritisannya Daoed Joesoef dan mengajaknya ikut-serta membesarkan lembaga *think tank* Orde Baru tersebut.

Keterlibatannya dalam CSIS, segera mengibarkan namanya. Tercatat beberapa kali ia memperoleh kedudukan strategis dalam lembaga tersebut.<sup>23</sup> Pada 1970-1973 dia didaulat sebagai Direktur CSIS, anggota Research CSIS Georgetown University, Washington DC Amerika Serikat tahun 1976- 1978. Pada tahun 1983-1999 dia menjabat Ketua Dewan Direktur CSIS, dan tahun 1999 dia berada dalam posisi Pembina Yayasan CSIS. Sebelum dipilih Presiden Soeharto sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun 1976-1978 dia telah menjabat sebagai Asisten Ahli menteri di departemen yang sama.

### **C. Pemikiran Daoed Joesoef untuk Pendidikan dan Kebudayaan**

Tawaran menjadi menteri menghampirinya sepulangnya dari Sorbonne. Presiden Soeharto memintanya menjadi menteri pada Kabinet Pembangunan III dan dilantik tanggal 31 Maret 1978. Dia diminta bukan mengurus ekonomi yang menjadi keahliannya, melainkan pendidikan. Saat bertemu Soeharto di Cendana, Daoed Joesoef pun menyampaikan konsep pendidikan yang disiapkannya.

Daoed Joesoef sendiri kaget, ketika mengetahui Soeharto telah mengetahui konsep yang akan diajukannya tentang pendidikan. “Itu sebuah misteri. Mungkin beliau tahu melalui Mohammad Hatta (mantan Wapres). Pasalnya, sebelum dipanggil Pak Harto, saya memang sempat menyampaikan konsep-konsep saya kepada Hatta. Entahlah”, ujar Daoed Joesoef pada *Kompas*.<sup>24</sup>

Sebagai Menteri P & K periode 1978-1983, Daoed Joesoef telah menyiapkan konsep pendidikan sebagai bagian dari kebudayaan, yang membangun masa depan melalui pendidikan generasi muda. Menurutnya generasi muda adalah investasi besar bangsa. “Mereka harapan sekaligus manusia masa depan. Melalui pendidikan kita menyiapkan masa depan. Ada nilai investasi di sana dengan memberi generasi muda cukup ilmu.”<sup>25</sup>

Daoed Joesoef adalah salah satu Menteri P & K yang termasuk paling banyak membuat kebijakan yang membikin “heboh” dan memiliki arti tertentu dalam sejarah dunia pendidikan Indonesia khususnya dan dalam kehidupan berbangsa pada

---

<sup>23</sup> Daoed Joesoef, *Rekam Jejak Anak Tiga Zaman*. Jakarta: Kompas, 2017.

<sup>24</sup> *Kompas*, 8 Agustus 2016.

<sup>25</sup> *Haluan*, 20 Mei 1979.

umumnya. Bahkan beberapa kebijakannya itu mendapat tanggapan dan protes yang luas di tengah masyarakat. Kebijakan pertamanya yang menyulut heboh terjadi sekitar empat bulan setelah dilantik sebagai Menteri P & K. Saat Daoed Joesoef menyusun Program Perpanjangan Wajib Belajar Mengajar untuk tahun ajaran 1978. Dia memutuskan memperpanjang tahun ajaran selama enam bulan sehingga tahun ajaran berikutnya akan mulai bulan Juli 1979. Ada beberapa alasan yang dikemukakan Daoed Joesoef mengenai kebijakan yang dia luncurkan ini. Pertama, libur panjang bulan Desember selama ini ternyata jatuh pada saat musim hujan lagi lebat-lebatnya dan itu merusak suasana liburan, kedua, dimulainya tahun ajaran pada bulan Januari (sejak 1966) menyulitkan perencanaan pendidikan - karena saat itu saat berakhirnya tahun anggaran. Jadi pengunduran ke bulan Juli dari segi ini dimaksud untuk menyesuaikan diri dengan permulaan tahun anggaran.<sup>26</sup> Di samping itu, pengunduran tahun ajaran ini juga itu dimaksudkan untuk program perbaikan dan pengayaan siswa. Kebetulan beberapa saat sebelum kebijakan tersebut dikemukakan Daoed Joesoef dirilis hasil penelitian tentang pelaksanaan pendidikan yang menyebut bahwa daya serap murid terhadap pelajaran di sekolah dasar tidak lebih dari 50-60%, sementara di SLP 40% dan SLTA sekitar 30%".<sup>27</sup> Untuk mengatasi persoalan biaya, Daoed Joesoef kemudian menambahkan bahwa selama enam bulan perpanjangan tahun ajaran itu siswa hanya akan dikenai Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sebesar 50 % dari besaran resmi. Namun, penurunan SPP ini hanya berlaku di sekolah negeri, sedangkan sekolah swasta tetap membayar penuh.

Rencana Daoed Joesoef tersebut mendapat reaksi yang luas di tengah masyarakat, dan umumnya menentang. Penolakan itu berasal dari hampir semua kalangan masyarakat, mulai dari hampir semua orang tua siswa hingga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rektor sejumlah universitas, mantan Menteri P dan K, mantan Gubernur DKI Jakarta Raya, dan berbagai pihak lainnya. Walaupun sekitar empat minggu setelah menyatakan gagasannya Daoed Joesoef pernah mengatakan penundaan rencananya tersebut, dengan kata lain tidak jadi dilaksanakan

---

<sup>26</sup> *Tempo*, 15 Juli 1978

<sup>27</sup> *Tempo*, 15 Juli 1978.

Juli 1979, dalam kenyataannya rencana dia tetap jalan, pergantian awal tahun ajaran tetap saja terjadi.<sup>28</sup>

Kebijakan lain yang diluncurkan Daoed Joesoef pada hari-hari pertama kepemimpinannya adalah membentuk Komisi Pembaharuan Pendidikan. Komisi yang akan memikirkan sistem pendidikan yang baru - bekerja selama satu setengah tahun. Komisi itu bertugas mengumpulkan informasi dari seluruh pelosok tanah air, membuat membikin konsep yang akan diterapkan dan selanjutnya melemparkan konsep tadi ke tengah masyarakat. Kegiatan ini dikatakan Daoed Joesoef sebagai upaya untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat. Dia bahkan menegaskan, konsep tersebut setidaknya akan dilempar ketengah masyarakat. Daoed Joesoef mengatakan bahwa akhir dari pekerjaan ini adalah lahirnya UU Pokok Pendidikan dan Kebudayaan. Daoed Joesoef sendiri menegaskan bahwa ini adalah sebuah pekerjaan besar yang mungkin saja tidak akan rampung dalam masa kepemimpinannya di Departemen P & K.



Gambar 4

Daoed Joesoef- Menteri P & K yang dikenal dengan konsep NKK/BKK pada akhir 1970an.

*Sumber:* Direpro dari koleksi Kompas TV.

Dengan merujuk pengalaman negara tempat dia menuntut ilmu (Perancis) dan juga Jerman, serta mengutip banyak pendapat ahli, Daoed Joesoef juga

---

<sup>28</sup> Hal ini bisa dimaklumi, pada masa Orde Baru, kritikan dari masyarakat luas terhadap kebijakan pemerintah umumnya jarang yang ditanggapi. Saat itu, apa yang dikatakan pemerintah biasanya tetap akan berjalan.

merencanakan memberikan perhatian yang jauh lebih besar kepada pendidikan prasekolah. Berkali-kali pada hari-hari pertamanya menjadi Menteri, Daoed Joesoef menyebut bahwa pada usia sampai enam tahunlah tingkat kecerdasan anak berkembang. Dia bahkan mengeritik kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan yang selama ini baru memberikan perhatian mulai dari pendidikan SD”.

Salah satu kebijakan Daoed yang cukup kontroversial dan memicu protes di kalangan mahasiswa dan masyarakat adalah pemberlakuan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK). Kebijakan NKK berlaku resmi setelah Mendikbud Daoed Joesoef mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus dan BKK berlaku resmi setelah keluarnya Surat Keputusan Nomor 037/U/1979 tentang Badan Koordinasi Kemahasiswaan yang berhasil menghilangkan aktivitas politik dan organisasi mahasiswa di kampus. Dengan keluarnya kedua SK ini kampus jadi kawasan "steril" dari aktivitas politik, Senat Mahasiswa dan Dewan Mahasiswa di tiap perguruan tinggi dibubarkan, dan aktivitas politik dan organisasi mahasiswa berhasil dihilangkan dari kampus.

Kebijakan yang dianggap kontroversial ini sebetulnya adalah akumulasi dari serentetan peristiwa yang melibatkan mahasiswa pada masa-masa sebelumnya. Muara dari berbagai peristiwa tersebut adalah protes terhadap pemerintah, dan pemerintah nampaknya tidak ingin lagi menjadi sasaran protes tersebut. Dalam fase yang paling awal dari sejarah Indonesia kontemporer, kebebasan yang dinikmati mahasiswa misalnya berhasil menumbangkan rezim Orde Lama pada tahun 1966. Selanjutnya, pada tahun 1971 mahasiswa memprotes sikap pemerintah yang dianggap berpihak kepada salah peserta Pemilu (Golongan Karya). Keberpihakan pemerintah itu dianggap mahasiswa menyebabkan jalannya Pemilu tidak sesuai dengan mottonya, jujur dan adil. Karena itu mahasiswa mengkampanyekan “golongan putih”, yakni tidak ikut-serta memberikan suara dalam Pemilu. Mahasiswa juga mengkritisi rencana pemerintah membangun Taman Mini Indonesia Indah tahun 1973 karena dianggap memboroskan keuangan negara yang saat itu nilainya sebesar Rp. 10,5 milyar sebuah yang sangat besar. Selanjutnya mahasiswa juga memprotes dengan keras derasnya masuk modal asing ke Indonesia dan mereka kemudian turun ke jalan berdemonstrasi. Demonstrasi yang kemudian dikenal dengan Malari (Mala Petaka Lima Belas Januari) 1974 itu dianggap sebagai aktivitas yang keterlaluan oleh pemerintah, apalagi

dilakukan pada saat kunjungan Perdana Menteri Jepang, Kukue Tanaka ke Indonesia (Jakarta).

Bagi Daoed Joesoef apa yang dilakukan oleh mahasiswa di atas adalah politik praktis. Di mata Daoed Joesoef mahasiswa bukanlah bagian (pelaku) dari politik praktis tersebut. Tugas utama mereka adalah membangkitkan kemampuan nalar individu serta mengembangkan kemampuan berpikir analisis dan sintetis. Bagi Daoed Joesoef, silahkan mahasiswa mempelajari politik, tetapi tidak berpolitik praktis. Dengan memperkenalkan NKK/BKK, Daoed Joesoef berupaya mengembalikan kampus sebagai sebuah lingkungan kaum intelektual, sebuah lingkungan tempat menuntut ilmu dan menyemai benih-benih kecendekiawanan. Organisasi kemahasiswaan yang diperbolehkan hanya pada level fakultas (senat mahasiswa) dan jurusan (himpunan mahasiswa). Konsep kebijakan NKK/BKK berhasil membelenggu kehidupan kampus untuk steril dan jauh dari campur tangan dalam urusan kebijakan politik pemerintah.

Sejalan dengan pemberlakuan NKK/BKK Daoed Joesoef juga memperkenalkan sistem pendidikan SKS (Satuan Kredit Semester). Melalui sistem ini mahasiswa dituntut untuk segera menyelesaikan kuliah. Mereka diprogram bisa menamatkan pendidikan dalam waktu empat sampai tujuh tahun. Program ini berbeda jauh sistem lama yang mahasiswanya bisa selesai sarjana (dengan gelar Doktorandus/Doktoranda, Sarjana Hukum atau Insinyur) hingga belasan tahun.<sup>29</sup>

Segeanp aktivitas mahasiswa di lingkungan kampus, ditulis Daoed dalam buku *Rekam Jejak Anak Tiga Zaman*, tidak lagi sesuai dengan hakikat kampus sebagai komunitas ilmiah. Akibatnya tidak lagi kondusif bagi usaha pemenuhan kebutuhan demokrasi akan pembentukan masyarakat sipil. Padahal eksistensi masyarakat sipil ini, seharusnya menjadi ideal gerakan mahasiswa dan bukan menjadi politikus insidental-sporadis di jalan raya. Melalui kebijakan NKK/BKK, Daoed Joesoef ingin mahasiswa menjadi pemikir seperti Bung Hatta, dan bukan sibuk demonstrasi. Di era Menteri Pendidikan Fuad Hasan keputusan Daoed itu dicabut dengan menerbitkan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan (PUOK) pada 1990.

---

<sup>29</sup> Sardiman & Yuliantri, "Dinamika Pendidikan Masa Orde Baru (Kebijakan Pendidikan Daoed Joesoef & Nurgroho Notosusanto", Laporan Penelitian, Tidak Diterbitkan, FIS UNY, 2012).



Seperti disebut di atas, pada Agustus 1978, Daoed Joesoef membentuk Komisi Pembaruan Pendidikan Nasional. Komisi ini ditugasi untuk merumuskan pendidikan nasional yang bersifat semesta, menyeluruh, dan terpadu. Pertama, semesta yang dimaksud di sini adalah meliputi seluruh elemen kebudayaan, mulai dari logika, etika, estetika, nilai-nilai moral, dan spritual. Kedua, menyeluruh dalam arti meliputi setiap jenis dan jenjang pendidikan di dalam dan luar sekolah. Ketiga, terpadu merupakan membina secara jelas kaitan fungsional, maupun hubungan suksesi antara jenis dan jenjang pendidikan.<sup>30</sup>

Pada masa kepemimpinannya, Departemen P & K mendapat kucuran dana yang yang besar, bahkan pada tahun terakhir jabatannya kementeriannya mendapat kucuran dana terbesar, yakni sebanyak 1,3 trilyun. Dengan dana sebesar itu kementeriannya melakukan banyak upaya untuk mewujudkan rencananya. Hingga tahun 1982 telah dibangun sebanyak 16 TK, 667 SMP, 131 SMTA, 8 STM, 7 SLB dan rehabilitasi 8 ruang kelas, pembangunan politeknik, pengadaan laboratorium, alat peraga, pengadaan buku ajar lebih dari 2,8 juta eksemplar, penataran terhadap 7.278 guru, serta pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi. Khusus untuk yang terakhir ini Daoed Joesoef memberi perhaian yang cukup besar kepada siswa-siswa dari Indonesia bagian timur. Pengadaan buku ajar dan peralatan belajar mencakup hampir semua jenjang pendidikan, muai dari SD, SMP, SMP, SPGLB, SGO, KPG, dan PGSLP.

Masih minimnya tenaga pengajar untuk pendidikan dasar dan menengah, tidak luput dari perhatian Daoed Joesoef. Pada 1979, ia menginstruksikan 10 IKIP Negeri, 2 IKIP Swasta, 12 Universitas Negeri, dan 2 Universitas Swasta untuk membuka program diploma akta mengajar, khusus untuk calon-calon guru. Dengan demikian, sejak era Daoed Joesoef, IKIP mulai diberikan prioritas penting dalam menyediakan calon-calon guru. Dalam kurikulum 1975, Daoed juga melakukan sedikit revisi, terutama dalam memunculkan nama mata pelajaran matematika.

Tidak hanya sekolah dasar, lanjutan dan tingka sarjana yang mendapa perhatian Daoed Joesoef. Pada era kepemimpinnya juga mulai dibuka jenjang pendidikan S-2 da S-3 di Universitas Indonesia. Sebagian besar mahasiswa S-2 dan

---

<sup>30</sup> S. Sumardi, dkk, *Menteri-menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sejak Tahun 1966*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1984.

S-3 adalah staf pengajar perguruan tinggi. Dengan demikian, Daoed Joesoef juga termasuk seorang menteri yang menaruh perhatian besar pada peningkatan kualitas pengajar di perguruan tinggi.

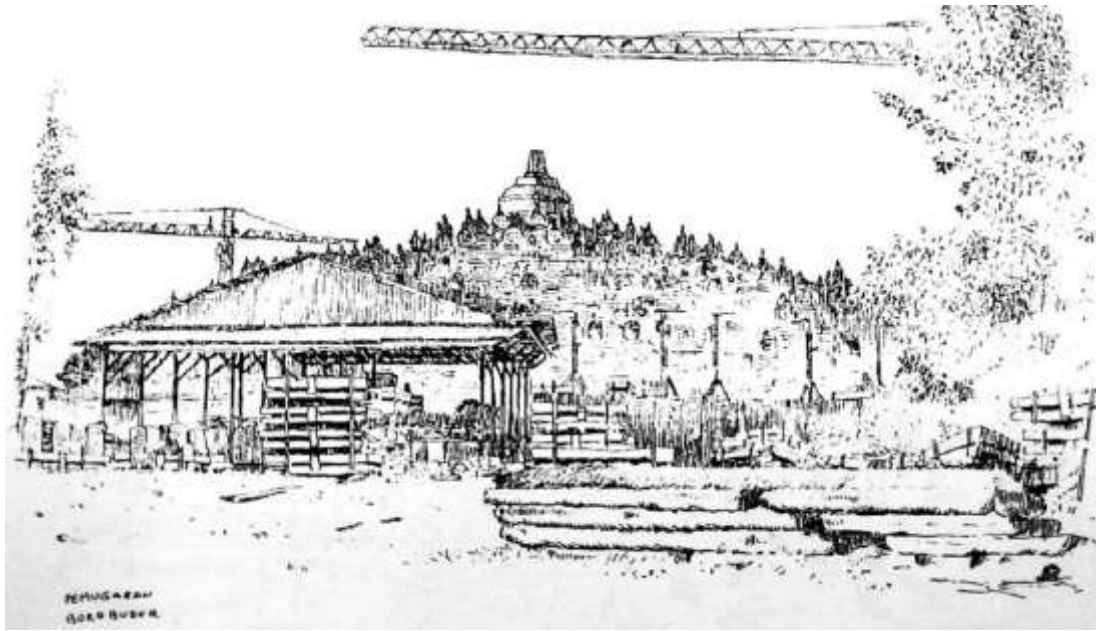
Perhatiannya pada kebudayaan pun tidak diragukan. Daoed Joesoef melihat bahwa ada hubungan yang sangat erat antara dunia pendidikan dan kebudayaan. Baginya, pusat kebudayaan adalah lingkungan sekolah-sekolah mulai SMTA ke bawah. Sekolah sebagai pusat kebudayaan menjadi amat begitu penting untuk membiasakan kepada anak didik untuk menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati dan mengamalkan pembelajaran di sekolah. Sekolah dapat dianggap sebagai pusat kebudayaan apabila telah mampu menciptakan masyarakat belajar, meningkatkan mutu pendidikan, menjadi teladan masyarakat.

Sebagai pusat kebudayaan, sekolah menjadi tumpuan pengembangan logika, etika, estetika dan praktika. Sehubungan dengan itu, budaya yang bisa dan seharusnya dikembangkan di sekolah antara lain: gemar, biasa dan lalu butuh membaca, rajin dan tekun belajar, suka meneliti, garah menulis analitis, bertaqwa kepada Tuhan YME, penghayatan dan pengalaman Pancasila, sopan santu serta berkepribadian, berdisiplin, menghargani seni, dapat menikmati seni, dapat menciptakan karya baru, menghargai pekerjaan fisik (disamping karya intelektual), terampil dan cekatan, serta mampu memanfaatkan teknologi.<sup>31</sup>

Jauh sebelum menjadi Menteri P & K, Daoed Joesoef telah melakukan gebrakan, terutama menarik perhatian dunia internasional terhadap nasib dari Candi Brobudur. Sejak menjadi kandidat doktor di Sorbonne, Daoed telah menyuarakan pada UNESCO tentang pentingnya rehabilitasi peninggalan bersejarah tersebut. Lima tahun sebelum menjabat Menteri P & K, ia ditunjuk untuk meralisasikan dana dari UNESCO untuk memegang tanggung jawab atas proyek rehabilitasi Candi Brobudur.

---

<sup>31</sup> Sardiman & Yuliantri, "Dinamika Pendidikan Masa Orde Baru.....", hal. 17.



Gambar 4 Sketsa Candi Brobudur yang sedang dipugar. Sketsa ini dibuat oleh Daoed Joesoef ketika ia ditunjuk sebagai penanggung jawab pemugaran.  
*Sumber:* <https://historia.id/kuno/articles/daoed-joesoef-dan-borobudur-vVJag>

Semasa menjabat Menteri P & K, Daoed Joesoef pernah menolak gelar Guru Besar yang diajukan UI pada tahun 1978. Kisahnya bermula pada pertengahan Juni 1978. Dekan FEU UI Dr Djuanedi Hadismuarto datang menemuinya di Departemen P & K, untuk menyerahkan surat keputusan Dewan Guru Besar FE-UI, tentang pengangkatan Daoed menjadi profesor. Surat itu perlu persetujuan Menteri Pendidikan yang notabenenya adalah dirinya sendiri. “Setelah membaca isinya, surat itu aku robek-robek dan memberikan robekannya kepadanya,” tulis Daoed Joesoef. Ia mengaku tidak suka dengan pengajuan jabatan Guru Besar tersebut, karena bernuansa menjilat dan memanfaatkan posisinya sebagai Menteri P & K. Akibat perbuatannya itu, akhirnya Daoed dikucilkan oleh institusinya.

Ketika heboh soal kontes berbagai jenis ratu, Daoed Joesoef juga ikut tampil menyuarakan pendapatnya. Dia termasuk sosok yang tidak menyetujui ajang kontes ratu-ratuan itu. Ketika Daoed Joesoef secara terbuka menolak segala jenis pemilihan miss dan ratu kecantikan. Ketika dia jadi menteri, Indoneasia memang tengah dilanda deman kontes miss dan ratu-ratuan. Saat itu ada ‘Miss Kacamata Rayban’, ‘Miss Jengki’, ‘Miss Fiat’, ‘Miss Pantai’, ‘Ratu Ayu Daerah’, ‘Ratu Ayu Indonesia’ dan

lain sebagainya. Tren ini nampaknya ada hubungannya dengan maraknya kontes ratu-ratan di tingkat internasional.

Daoed Joesoef menilai "Pemilihan ratu-ratuan seperti yang dilakukan sampai sekarang adalah suatu penipuan, di samping pelecehan terhadap hakikat keperempuanan dari makhluk (manusia) perempuan. Tujuan kegiatan ini adalah tak lain dari meraup keuntungan berbisnis, bisnis tertentu; perusahaan kosmetika, pakaian renang, rumah mode, salon kecantikan, dengan mengeksploitasi kecantikan yang sekaligus merupakan kelemahan perempuan, insting primitif dan nafsu elementer laki-laki dan kebutuhan akan uang untuk bisa hidup mewah. Sebagai ekonom aku tidak a priori anti kegiatan bisnis. Adalah normal mencari keuntungan dalam berbisnis, namun bisnis tidak boleh mengenyampingkan begitu saja etika. Janganlah menutup-nutupi target keuntungan bisnis itu dengan dalih muluk-muluk, sampai-sampai mengatasnamakan bangsa dan negara".

Pandangan Daoed Joesoef ini cukup kritis, apalagi pelaksanaan berbagai kontes ratu-ratuan tersebut secara langsung atau tidak didukung oleh pemerintah, sebab dikaitkan juga dengan promosi wisata. Kekritisan Daoed Joesoef itu dalam diliha dari pernyaannya "Pendek kata kalau di zaman dahulu para penguasa (raja) saling mengirim hadiah berupa perempuan, zaman sekarang pebisnis yang berkedok lembaga kecantikan, dengan dukungan pemerintah dan restu publik, mengirim perempuan pilihan untuk turut "meramaikan" pesta kecantikan perempuan di forum internasional".

Sikap budayanya yang lain, yang juga dianggap kontroversi saat dia menjadi Menteri P&K adalah keputusannya untuk tidak meliburkan sekolah pada bulan Ramadhan, menolak mengucapkan salam (Asalamaualaikum Warahmatulallihi wabarakatuh) dalam acara-acara esmi, serta pernah menguulkan untuk meniadakan pelajaran Agama Islam di sekolah-sekolah umum.

## --- IV ---

### **BRIGJEN (PURN) PROF. DR. NUGROHO NOTOSUSANTO: MENDIKBUD YANG SEJARAWAN (1983-1985)**

#### **A. Riwayat Hidup dan Masa Pendidikan**

Nugroho Notosusanto, demikian nama lengkap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang menggantikan posisi Daoed Joesoef. Karir Nugroho, demikian panggilan akrab anak dari anak tertua dari Prof. Mr. R.P. Notosusanto itu

di Departemen P & K memang terbilang singkat. Nugroho hanya menjabat menteri sekitar dua tahun (1983-1985). Dia tidak dapat menyelesaikan amanah yang diberikan kepadanya hingga akhir masa jabatan menteri dalam Kabinet Pembangunan IV, karena dia berpulang pada Senin tanggal 3 Juni 1985 pukul 12.30, di rumah kediamannya. Dia meninggal karena pendarahan otak akibat tekanan darah tinggi.



Gambar 1 Nugroho Notosusanto, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983-1985

*Sumber:* Pusdok Kemdikbud tahun 1985.

Nugroho lahir tanggal 15 Juni 1931 di Rembang Jawa Tengah. Ia merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Ia dibesarkan di kalangan keluarga terdidik.<sup>32</sup> Ayahnya mempunyai kedudukan terhormat, yaitu seorang ahli hukum Islam di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, sekaligus salah satu pendiri Universitas Gajah Mada. Kakak dari ayah Nugroho, yakni R.P Notosusanto adalah seorang patih di Rembang. Pangkat patih pada masa pra-kemerdekaan merupakan suatu

---

<sup>32</sup> S. Sumardi, dkk, *Menteri-menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sejak Tahun 1966*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1984.

kedudukan yang tinggi, mengingat sulit bagi kalangan pribumi untuk mendapatkan posisi tersebut.

Nugroho Notosusanto mengikuti pendidikan dasar di *Europeese Lagere School* (ELS). Selepas dari ELS, Nugroho melanjutkan pendidikannya ke SMP dan menamatkan pendidikan lanjutan tingkat pertama itu tahun 1944. Pendidikan dasar dan lanjutan tingkat pertama tersebut dia ikuti di kota kelahirannya Pati. Untuk memasuki lembaga pendidikan yang lebih tinggi (SMA sekolah lanjutan tingkat atas) Nugroho merantau ke Yogyakarta dan bersekolah di SMA Yogyakarta.<sup>33</sup>

Ketika menempuh pendidikan di SMA, warga Yogyakarta khususnya dan Indonesia umumnya tengah berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali berkuasa di persada ini. Nugroho Notosusanto juga terpanggil untuk ikut berjuang, karena itu dia bergabung dengan Tentara Pelajar (TP) Brigade 17 dan TKR Yogyakarta. Ketika tamat SMA tahun 1951, Nugroho dihadapkan pada dua pilihan, yaitu meneruskan karier militer dengan mengikuti pendidikan perwira, ataukah menuruti apa yang diamanatkan ayahnya untuk menempuh karier akademis. Nugroho memilih untuk mengikuti amanat ayahnya. Atas saran dari ayahnya, dia memutuskan untuk kuliah pada Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Gelar Doktorandus (Drs.) di bidang sejarah dia raih tahun 1960, dan langsung diangkat sebagai dosen di almamaternya. Dua tahun setelah menjadi dosen Nugroho mendapat kesempatan menambah ilmunya dalam bidang sejarah dan filsafat di University of London. Karir tertinggi di bidang akademis dicapai Nugroho ketika dia berhasil menuntaskan pendidikan doktornya di Universitas Indonesia dengan disertasi berjudul “The Peta Army During the Japanese Occupation in Indonesia”. Disertasi Nugroho disusun berdasarkan wawancara dan penelusuran dokumentasi sejarah, yang ia peroleh dari dalam dan luar negeri. Tulisan ini kelak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Tentara Peta pada Zaman Pendudukan Jepang di Indonesia*, dan diterbitkan oleh penerbit Gramedia tahun 1979.

---

<sup>33</sup> Menurut Nugroho Notosusanto dia berkenalan dengan Daoed Joesoef, bahkan ia mengatakan bahwa Daoed Joesoef adalah mentornya ketika di SMA dulu. Entah kebetulan atau tidak, ketika diamanahi menjadi Menteri P & K, Daoed Joesoef juga menjadi “senior”nya alias menjadi pendahulunya.



Gambar 2 *Tentara Peta pada Zaman Pendudukan Jepang di Indonesia*, merupakan karya dari Nugroho Notosusanto, yang bermula dari disertasinya yang berjudul *The Peta Army During the Japanese Occupation in Indonesia*.

Sumber: Notosusanto, 1979

Dunia militer memang memiliki peran yang cukup besar dalam diri dan Nugroho. Seperti disebut di atas, pada masa SMA Nugroho tergabung kedalam kesatuan TP. Pada saat dia menjadi dosen di UI, tepatnya sejak tahun 1964 dia juga dipercaya menduduki posisi sebagai Kepala Pusat Sejarah Angkatan Darat. Pada tahun 1967, Nugroho mendapatkan pangkat kolonel tituler berdasarkan SK Panglima AD No. Kep. 1994/12/67. Pada masa kepemimpinannya, Pusat Sejarah Angkatan Darat banyak menerbitkan buku yang berkenaan dengan operasi-operasi militer (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia-ABRI) dalam menumpas berbagai pemberontakan atau gerakan separatis yang dilakukan oleh daerah-daerah, seperti *GOM II: Operasi Penumpasan APRA*, *GOM V: Darah Tersimbah Di Jawa Barat - Gerakan Militer V*, *GOM VI: Penumpasan DI/TII Di Jawa Tengah*, *GOM VII: Gerakan Operasi Militer VII/Penyelesaian Peristiwa DI/TII Di Aceh*, *Sejarah Operasi-Operasi Gabungan Terhadap PRRI/Permesta*, biografi beberapa tokoh



pejuang serta tokoh militer, seperti Komodor Udara Adi Sutjipto: Bapak Penerbang, Panglima Besar Sudirman: Pemimpin, Pejuang dan Pahlawan, dlsbnya.

Memiliki latar belakang sebagai dosen, mengantarkan Nugroho menjadi pengajar di berbagai sekolah di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Dia tercatat sebagai staf pegajar pada Sekolah Staf Komando Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (SESKO-ABRI), berturut pada bagian Darat, Laut, Udara dan Kepolisian. Dia juga tercatat sebagai pengajar pada Lembaga Pertahanan Nasional (LEMHANAS). Tidak hanya aktif mengajar di lingkungan angkatan bersenjata, dia juga mengajar di Sekkolah Staf Dinas Luar Negeri (SESDILU).

Di samping berbagai pekerjaan di atas, Nugroho juga menduduki posisi sebagai Wakil Ketua Harian Pembina Pahlawan Pusat, anggota Dewan Pers, anggota Badan Pertimbangan Perintis Kemerdekaan.

Di habitat awalnya, di kampus UI Nugroho memegang beberapa penting. Ia pernah menjadi Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan FSUI, menjadi Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan. Puncak karirnya di lingkungan UI adalah menduduki jabatan rektor. Dia dilantik menjadi orang nomor satu di kampus perjuangan itu berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 5/M/1982 untu periode 1982-1986. Ketika dilantik menjadi Rektor UI, dia disambut dengan kecemasan dan caci maki para mahasiswa UI. Mahasiswa menudingnya sebagai seorang militer dan “orang pemerintah” yang disusupkan ke dalam kampus untuk mematikan kebebasan kehidupan mahasiswa.

Status sebagai dosen, Kepala Pusat Sejarah Angkatan Angkatan Darat , dan keterlibatnnya dalam berbagai lembaga pendidikan menyebabkan Nugroho semakin akrab dengan dunia tulis menulis. Bakat tulis menulis Nugroho sesungguhnya telah muncul sejak dia mengikuti pendidikan di sekolah dasar dan sekolah lanjutan. Saat itu dia mempunyai kesenangan mengarang cerita. Cerita Nugroho muda bernapas perjuangan.

Bakat menulis Nugroho semakin tersalurkan ketika dia menjadi mahasiswa. Saat itu Nugroho sudah menjadi anggota redaksi harian *KAMI*. Pada awalnya, ia sering menulis cerpen dan sastra. Di bidang keredaksian dapat dicatat sejumlah pengalamannya, yaitu memimpin majalah *Gelora*, menjadi pemimpin

redaksi *Kompas*, anggota dewan redaksi *Mahasiswa*, bersama Emil Salim menjadi ketua juri hadiah sastra, dan pengurus BMKN sejak 1955-1958.

Sewaktu menjadi mahasiswa dia menjadi koresponden majalah *Forum*, dan menjadi redaksi majalah *Pelajar*. Pengarang yang dimasukkan H.B. Jassin ke dalam golongan sastrawan Angkatan 66, juga dikategorikan sebagai sastrawan Angkatan Baru (Periode 1950-an) oleh Ajip Rosidi.<sup>34</sup>

Di antara pengarang semasanya, Nugroho dikenal sebagai penulis esai. Sebagian besar pengarang waktu itu hanya menulis cerpen dan sajak, tetapi Nugroho banyak menulis esai. Nugroho menyelami zamannya, terutama tentang sastra dan kebudayaan. Tulisan-tulisan yang berisi pembelaan para sastrawan muda, yaitu ketika terdengar suara-suara tentang krisis kesusastraan, menyebabkan Nugroho Notosusanto tertarik dalam dunia sastra Indonesia. Nugroholah yang memprakarsai Simposium Sastra FSUI pada tahun 1953; yang kemudian dijadikan tradisi tahunan sampai tahun 1958.

Sebagai sastrawan, pada mulanya Nugroho menghasilkan sajak dan sebagian besar pernah dimuat di harian ibu kota. Oleh karena tidak pernah mendapat kepuasan dalam menulis sajak, Nugroho kemudian mengkhususkan diri sebagai pengarang prosa, terutama cerpen dan esai. Karya prosanya pernah dimuat di berbagai majalah dan surat kabar seperti *Gelora*, *Kompas*, *Mahasiswa*, *Indonesia*, *Cerita*, *Siasat*, *Nasional*, *Budaya*, dan *Kisah*.

Sebagai sejarawan, Nugroho Juga telah berhasil menulis sejumlah makalah, artikel dan buku. Sebagian besar karyanya berhubungan dengan dunia militer. Setidaknya ada 50-an karya jenis ini yang dihasilkannya.<sup>35</sup> Sebagian karyanya tersebut pernah menjadi kontroversi, terutama yang berhubungan sejarah penggalian Pancasila, peranan militer dalam kehidupan politik Indonesia, dan perkembangan politik Indonesia kontemporer. Kritik yang dilontarkan terhadapnya berkenaan dengan sikapnya yang relatif menonjolkan peranan militer dan peranan Soeharto di panggung sejarah Indonesia kontemporer, serta pengenyampingan peranan tokoh-tokoh lain seperti Sukarno.

---

<sup>34</sup> Ajip Rosidi, *Ichisar Sejarah Sasetra Indonesia*. (Jakarta: Binacipta, 1969).

<sup>35</sup> S. Sumardi, dkk, *Menteri-menteri Pendidikan dan Kebudayaan.....*, hal. 80-85.

Berbagai prestasi yang diraih Nugroho tentu tidak terlepas dari dukungan keluarganya. Nugroho memiliki seorang istri, yakni Irma Savitri Ramelan (Lilik) yang dikenalnya sewaktu dia masih mahasiswa. Beliau menikahi keponakan dari ibu B.J. Habibie tersebut. Dari perkawinan itu, mereka dikaruniai tiga orang anak, yakni Indrya Smita, Inggita Suksma, dan Narottama.

Ayah Nugroho yang sudah lama pensiun dari dunia akademis, senantiasa mengikuti perkembangan karir putranya. Ternyata, 29 tahun setelah dia menyarankan Nugroho melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, keinginan R.P. Notosusanto terkabul. Pada tanggal 5 Januari 1980 Nugroho dikukuhkan sebagai Guru Besar KSUI dengan orasi yang berjudul *Sejarah demi Masa Kini*. Sayangnya, sang ayah tidak sempat menyaksikan pengukuhan tersebut karena dia wafat tanggal 30 April 1979, lebih kurang satu tahun sebelum pengukuhan putranya itu.

## **B. Pemikiran di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan**

Pada tanggal 19 Maret 1983, Nugroho dilantik menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam Kabinet Pembangunan IV. Langkah pertama yang dilakukan Nugroho setelah dilantik Presiden Soeharto adalah memberhentikan dengan hormat Kelompok Kerja Menteri pada April 1983. Nugroho menganggap kelompok ini adalah bagian eksternal Departemen P & K, dan ia hanya akan memberdayakan internal organ strukturalnya saja.

Dalam pandangan Nugroho, pendidikan nasional merupakan hal yang paling vital, karena menentukan masa depan bangsa dan negara. Pendidikan Nasional Indonesia, dalam pandangan Nugroho haruslah berlandaskan Pancasila dan bertujuan meningkatkan ketakwaannya kepada Tuhan YME, kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, dan lain sebagainya. Adapun arah dari pendidikan nasional yang diharapkan Nugroho adalah modernisasi berlandaskan kebudayaan bangsa dan integrasi nasional berdasarkan prinsip Bhineka Tunggal Ika.

Nugroho juga menekankan pendidikan tidak semata-mata menjadi kewajiban sekolah (pemerintah) saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Dia menegaskan hal ini karena dalam kenyataannya, pendidikan tidak hanya dilaksanakan di sekolah saja, tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Bahkan dia menyebut bahwa “waktu belajar” di tengah keluarga dan masyarakat jauh lebih panjang bila dibandingkan dengan waktu belajar di sekolah.

Pandangan lain Nugroho tentang pendidikan adalah membuat peserta didik menjadi orang yang aktif dan kreatif. Sekolah menurut Nugroho hendaknya menjadi sebuah lembaga yang mendidik siswa mampu berbuat untuk dirinya, mampu mengembangkan apa yang diberikan kepadanya, baik pada masa di sekolah atau setelah menamatkan sekolah. Dengan demikian,, menurut Nugroho sekolah tidak boleh membuat siswa hanya menerima dan mencukupkan apa yang disajikan oleh para guru semata. Dengan kata lain, Nugroho menganut pandangan jangan memberikan kepada peserta didik, tetapi berilah dia pancing. Kalau memberi ikan hanya akan membuat siswa memakan apa yang diberikan kepadanya, mencukup apa yang dimilikinya saja. Sebaliknya bila memberi pancing siswa akan aktif dan memiliki kemampuan untuk berbuat, tidak hanya untuk waktu yang sesaat, tetapi juga untuk masa yang lama dalam hidupnya.<sup>36</sup>

Sebuah kebijakan yang prinsip yang dilakukan Nugroho adalah perubahan kurikulum 1975 menjadi kurikulum 1984. Melalui perubahan ini Nugroho memasukan pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) sebagai mata pelajaran wajib, mulai dari jenjang pendidikan sekolah dasar sampai menengah atas. Di samping itu Nugroho juga menjadikan mata pelajaran Sejarah Nasional Indonesia dan Dunia (SNID). Ide dasar yang diinginkan dari pengenalan mata pelajaran ini adalah agar peserta didik mengemperluas dan mengembangkan jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945 serta meningkatkan rasa cinta kepada tanah air. Dengan mengikuti pelajaran ini peserta didik mengenal sejarah bangsanya dan sejarah dunia dengan lebih baik dan siswa dapat mengambil pelajaran dari peristiwa sejarah.<sup>37</sup>

Gagasan Nugroho ini adalah hasil kajiannya tentang apa yang terjadi dalam dunia pendidikan pada masa sebelumnya. Di masa-masa sebelumnya materi ajar di pendidikan dasar dan menengah terlalu fokus pada materi yang sifatnya saintifik dan kurang memberi tempat kepada pendidikan karakter dan akhlak. Alasan lain yang juga sering disebut sebagai dasar pengenalan mata pelajaran yang berhubungan

---

<sup>36</sup> S. Sumardi, dkk, *Menteri-menteri Pendidikan dan Kebudayaan.....*, hal. 77.

<sup>37</sup> Rustam Ambong, “Konstelasi Kurikulum Pendidikan di Indonesia” *da;a Jural At-Turats*, Vol. 9, No. 2, Desember 2015, hal. 39.

dengan sejarah ini adalah realitas yang ditemukan pada taruna akademi militer. Disebutkan bahwa suatu kali Jenderal M. Yusuf mendapati kenyataan bahwa taruna AKABRI saat itu memiliki pengetahuan yang dangkal mengenai sejarah perjuangan bangsanya sendiri. Berangkat dari kenyataan tersebut, M. Jusuf menyampaikan kepada Presiden Soeharto mengenai pentingnya penanaman nilai perjuangan bangsa ke dalam hati siswa tidak hanya sebagai pelajaran belaka.

Sejak saat itu, PSPB mulai diberlakukan sebagai satu mata pelajaran secara spesifik dan diatur langsung dalam TAP MPR No II/MPR/1982 tentang GBHN. “Dalam rangka meneruskan & mengembangkan jiwa, semangat & nilai-nilai 1945 kepada generasi muda, maka di sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta, wajib diberikan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa.”

Tetapi belum lama diperkenalkan, keberadaan PSPB menimbulkan banyak tanggapan yang umumnya berdana negatif. Materi PSPB dinilai tumpang tindih dengan materi mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP), Sejarah Nasional, dan Ilmu Pengetahuan Sosial yang semuanya membicarakan tentang sejarah nasional Indonesia. Tidak itu saja, protes yang sangat keras muncul karena buku ajar untuk mata pelajaran ini belum dipersiapkan. Para guru disuruh mengaplikasikan PSPB tanpa buku ajar atau buku yang dipersiapkan dengan tergesa-gesa. Pedasnya kritik terhadap pelaksanaan pengajaran seperti ini bisa dilihat dari munculnya plesetan terhadap kepanjangan PSPB, yaitu Pedoman Supaya Pelajar Bingung.



Gambar 4 Buku pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) untuk siswa SMP kelas 1.

*Sumber:* Giring, 1985.

Background sebagai Guru Besar Ilmu Sejarah UI, mendorong Nugroho juga menekankan pentingnya aspek pendidikan humaniora dalam kurikulum. Dalam tiap kesempatan, Nugroho melihat pendidikan Humaniora sebelumnya tidak mendapat apresiasi, dan tidak begitu dikenal luas dalam masyarakat. Padahal, humaniora merupakan bidang studi yang menafsirkan makna kehidupan manusia di dunia, dan berusaha menambah martabat penghidupan dan eksistensi manusia. Selain itu ilmu humaniora, tambah Nugroho mampu memberikan pengertian yang lebih manusiawi dari manusia, sebagai kebalikan dari aspek-aspek lainnya.

Nugroho dalam masa jabatannya, juga memperhitungkan kalkulasi kebijakan Pemerintah Orde Baru, yang ingin menyatukan seluruh ormas dan partai politik di bawah bendera Pancasila. Untuk meningkatkan Pendidikan Pancasila, lanjut Nugroho melihat tidak cukup melalui Pendidikan Pancasila, Pendidikan Sejarah, PSPB, dan penataran P4. Justru, menurut Nugroho lebih efektif dilaksanakan dalam *Pancasila in Action*. Melalui kebijakan ini, penegakkan tata pergaulan, tata krama dapat dilaksanakan berdasarkan pembinaan dan keselarasan.

Di samping PSPB dan Pendidikan Humaniora, banyak jasa Nugroho dalam dunia pendidikan baik untuk tingkat sekolah dasar dan lanjutan atau perguruan tinggi. Gebrakan Nugroho yang lain adalah menghapus tiga jurusan di SMA, yakni jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Bahasa dan menggantinya lima jurusan, yaitu: pertama, Jurusan A1, Program Ilmu Fisik meliputi bidang studi matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia; kedua, Program A2, atau Ilmu Biologi yang mencakup bidang biologi, matematika, kimia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris; ketiga, Program A3 atau Ilmu-ilmu Sosial mencakup ekonomi termasuk akuntansi, PMP., Sejarah nasional Indonesia dan Dunia, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris; 4). Program A4 atau Pengetahuan Budaya meliputi pelajaran PMP, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris, Sejarah Nasional dan Sejarah Dunia, pendidikan Seni dan Bahasa Inggris; 5). Program A5 menjuruskan murid-murid SMA untuk menekuni ilmu-ilmu agama. Selain itu dikenal juga Program B, yang khusus untuk mengantarkan lulusan SMA masuk dunia kerja. Sayangnya di tengah masyarakat, Program B ini dicap sebagai program untuk siswa buangan.<sup>38</sup>

Di dunia pendidikan tinggi, Nugroho terkenal dengan idenya yang mengganti Proyek Perintis dengan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SIPENMARU). Melalui sistem ini penerimaan calon mahasiswa baru semua perguruan tinggi dilakukan secara bersamaan. Jadi menghapus adanya kelompok perguruan tinggi yang hebat dan tidak hebat. Bersamaan dengan itu juga diperkenalkan penerimaan mahasiswa baru tanpa tes yang dikenal dengan julukan Penelusuran Minat dan Bakat (PMDK). Kebijakannya yang lain dalam dunia pendidikan tinggi adalah penganalan Universitas Terbuka (UT). sebagai perguruan tinggi negeri yang paling bungsu di Indonesia. Tidak membuat yang baru, Nugroho juga meninggalkan kesan sebagai seorang menteri yang suka mengganti penamaan pada perguruan tinggi. Dia tercatat sebagai menteri yang mengubah penamaan Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) menjadi Institut Seni Indonesia (ISI). Hal ini ditandai dengan perubahan nama ASRI Yogyakarta menjadi ISI Yogyakarta melalui Keputusan Presiden No. 39/1984 dan peresmian penamaan itu oleh Nugroho tanggal 23 Juli 1983.

---

<sup>38</sup> Darmaningtyas, *Pendidikan yang Memiskinkan* (Yogyakarta: Galang Press, 2004). hal. 75.

Dalam rangka membantu siswa yang kurang mampu, Nugroho meluncurkan Program Orang Tua Asuh (OTA). Program yang diluncurkan pertama kali di Yogyakarta tersebut dengan segera dikung oleh Presiden Soeharto. Dukungan presiden ternyata berdampak masif, sebab dalam waktu yang tidak berapa lama sudah tercatat banyak orang tua asuh di berbagai sekolah. Melalui Program OTA ini, Nugroho menyebutkan bahwa seseorang bisa memberikan uang sebesar R 5.000,- kepada sebuah sekolah, dan sekolah yang bersangkutanlah yang akan menentukan siswa mana yang akan menjadi “anak asuh” dari orang yang bersangkutan.<sup>39</sup> Ia sendiri mengangkat seorang anak asuh yang bernama Yahda Tragedi, anak seorang penjual koran.

Khusus untuk program wajib belajar, Nugroho mempunyai dasar pemikiran tersendiri. Ia ingin mendorong Departemen P&K yang dipimpinnya, mampu memberi kesempatan untuk tiap-tiap anak bangsa memperoleh pendidikannya, sekaligus mengarah pada kebutuhan pembangunan di segala bidang, dengan sistem pembinaan yang mantap dan terpadu.

Sebuah kebijakan lain yang dilakukan Nugroho semasa menjadi menteri adalah penggantian singkatan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dari P dan K menjadi Depdikbud, Departemen Pertahanan Keamanan menjadi Dephankam, dan sebagainya. Singkatan-singkatan yang dia kemukakan ini dinilai banyak pihak berbunyi buruk, atau mengacu kepada singkatan yang lazim digunakan di dunia militer Indonesia yang oleh sebagian kalangan disebut tidak berdasarkan kaidah penyingkatan yang benar, misalnya menggunakan huruf-huruf di awal, di tengah atau berakir. Tetapi oleh Nugroho, dengan mengacu pada kelaziman di dunia ABRI, penyingkatan dilakukan dengan pola campur aduk saja. Ada huruf pengambilan huruf awal, tengah atau akhir.<sup>40</sup>

Adanya bau-bau militer dari kebijakan Nugroho juga dikaitkan orang dengan keterlibatannya dalam pembuatan skenario untuk film Pengkhianatan G30S/PKI. Film tersebut dituding sebagai versi resmi Orde Baru tentang tragedi yang terjadi pada penghujung September 1965 itu. Film tersebut kemudian dijadikan tontonan

---

<sup>39</sup> Antara, 25 Juli 1984.

<sup>40</sup> Darmaningtyas, *Pendidikan yang Memiskinkan*, hal. 75.



wajib untuk murid-murid sekolah di seluruh Indonesia, diputar sebagai acara rutin setiap tahun di TVRI pada malam tanggal 30 September hingga tahun 1997.

Pada saat sebagian kebijakannya tengah dihebohkan masyarakat, beliau meninggal dunia. Dia wafat tanggal 3 Juni 1985. Akibatnya, kebijakan-kebijakan tersebut tidak bisa diimplementasikan dengan utuh. Apalagi menteri yang menggantikannya juga memiliki kebiakan yang tersendiri pula.

Puncak pengakuan atas sumbangan Nugroho terhadap bangsa Indonesia adalah diberikannya Bintang Dharma, Bintang Gerilya, Bintang Yudha Dharma Nararya, Satyalancana Penegak, Satyalancana Penegak Perang Kemerdekaan I dan II, Bintang Matahaputra Adi Pradhana.

**PROF. DR. FUAD HASAN:  
SANG MENDIKBUD YANG HUMANIS (1985-1993)**

**A. Masa Kecil dan Jenjang Pendidikan**

Fuad Hasan dilahirkan dari pasangan Ahmad Hasan dan Tjiptaningroem di Semarang, Jawa Tengah, tanggal 26 Juni 1929. Fuad Hasan adalah anak kedua dari empat bersaudara. Fuad Hasan mengikuti pendidikan dasar hingga sekolah lanjutan atas di Solo. Terlahir sebagai anak dari seorang ayah pemain mandolin yang piawai menjadikan Fuad mewarisi darah seni yang kuat. Bahkan, semenjak kecil Fuad bermimpi menjadi seorang konduktor. Tidak hanya sekedar bermimpi, sejak usia sekolah dasar pun dia telah aktif dalam dunia musik. Dia sering bolos belajar hanya karena ingin bermain atau berlatih musik. Alat musik yang paling disenangnya waktu kecil adalah biola. Dia sering berlatih dan bermain musik di RRI. Kegilaan bermain musik yang menyebabkannya sering bolos sekolah, dan perangai yang tidak baik ini akhirnya diketahui orang tuanya. Namun, ayahnya yang bersikap liberalis tersebut tidak serta-merta bersikap keras melarang Fuad bermain musik, tetapi dia hanya mengarahkan dan mengingatkan bahwa pendidikan formal juga perlu. Dan yang paling penting, sang ayah ternyata merestui minat Fuad dengan mengatakan kalau memilih untuk terjun ke dunia musik terjunlah secara total, jangan setengah-setengah.

Berbekal restu sang ayah dan ditambah dengan keiginan yang besar untuk memperdalam keahlian dalam bidang musik, tahun 1950 Fuad berangkat ke Jakarta. Di ibu kota tersebut Fuad mendaftar untuk mengikuti tes sekolah musik di Roma, Italia. Sayangnya, tekad yang sudah mengkristal tersebut segera mencair dan dia mengurungkan niat menjadi musikus profesional. Ada informasi yang mengatakan bahwa mundurnya Fuad karena pengaruh teman serta adanya kesadaran dari dirinya sendiri. Kesadaran bahwa setelah dia melihat banyak orang yang bermain musik

selama puluhan tahun, tetapi nyaris tidak mendapat apresiasi yang wajar dari klayak ramai.

Fuad kemudian menjatuhkan pilihan, untuk melanjutkan pendidikannya di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI) pada tahun 1950. Pendidikan sarjananya dia rampungkan pada tahun 1958. Otak yang cemerlang, mengantarkan Fuad melanjutkan studi S2. Dia ingin mendalami filsafat pada Fakultas Psikologi dan Filsafat Toronto University, Kanada. Studi Magister itu dia selesaikan pada tahun 1962. Gelar Doktorat baru dia peroleh pada tahun 1967 di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dengan disertasi berjudul “Neurosis sebagai Konflik Eksistensial”.



Gambar 1

Fuad Hasan semasa menjabat Dekan Fakultas Psikologi UI (1972-1976). Pada masa itu, ia juga merangkap Direktur Lembaga Studi Strategis Dewan Pertahanan Keamanan Nasional.

## **B. Jenjang Karir Fuad Hasan**

Sebelum menduduki kursi tertinggi di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud), Fuad memiliki serentetan panjang pekerjaan. Sebagian di antaranya berhubungan dengan dengan dunia pendidikan. Fuad mengawali karir sebagai asisten pada Balai Psikoteknik Departemen P & K (1952- 1956). Kemudian menjadi Asisten Jurusan Psikologi Fakultas Kedokteran UI (1956-1958). Ketika Presiden Sukarno membentuk sebuah organisasi berbasis intelijen pada saat

konfrontasi Indonesia-Malaysia yang dinamakan Komando Operasi Tertinggi G-5 (KOTI G-5) Fuad direkrut sebagai salah seorang tenaga ahli pada lembaga tersebut (1965). Setelah Soeharto naik ke tampuk pemerintah RI, Fuad langsung masuk ke dalam lingkungan dalam istana dan dia diangkat menjadi Anggota Tim Ahli bidang Politik Staf Presiden (1966-1968). Diujung karirnya sebagai Anggota Tim Ahli bidang Politik Staf Presiden dia diangkat menjadi anggota DPR/MPR.

Sebagai pendidik, Fuad tidak hanya aktif menjadi dosen di almaternya, tetapi juga tercatat sebagai pengajar Seskoad, Seskoal dan Lemhanas. Di almamaternya dia tercatat pernah menjadi Dekan Fakultas Psikologi, dan pada waktu yang bersamaan juga diamanahi beban sebagai Direkur Studi Strategis Dewan Pertahanan Keamaman Nasional (1972-1976). Segera setelah mengakhiri tugasnya di dua lembaga ini, Fuad diangkat menjadi Dua Besar RI untuk Mesir, merangkap Sudan, Somalia, dan Jibouti (1976-1980). Kiprahnya sebagai duta besar dan pengalamannya yang lama malang melintang di dunia pendidikan menyebabkannya dipercaya oleh Departemen Luar Negeri menjadi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri (1980-1985). Dua tahun setelah menduduki jabatan itu Fuad untuk kedua kalinya diangkat menjadi anggota MPR (1982-1987).

Seakan-akan tidak pernah lepas dari jabatan, pada saat mengemban berbagai amanah tersebut, Fuad kemudian dipercayai oleh Presiden Soeharto untuk melanjutkan pekerjaan Nugroho Notosusanto sebagai Mendikbud yang meninggal dunia tanggal 3 Juni 1985. Dia dilantik di Istana Negara tanggal 30 Juli 1985. Dalam amanatnya saat pelantikan tersebut, Soeharto mengingatkan bahwa dalam zaman pembangunan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas yang tidak ringan. Hal ini karena, pendidikan dan kebudayaan merupakan bagian yang teramat penting dari keseluruhan pembangunan bangsa kita dalam arti yang seluas-luasnya.

Kecerdasan, kemampuan, bahkan juga watak bangsa Indonesia di masa datang, lanjut Soeharto akan banyak ditentukan oleh pendidikan yang diberikan sekarang kepada anak-anak bangsa dan pengembangan budaya di masa kini. Sehingga salah satu pokok tugas negara adalah meningkatkan kecerdasan dan memperkuat watak bangsa, serta mengembangkan budaya, agar bangsa Indonesia mampu tumbuh menjadi bangsa yang maju dan berbudaya, kuat, dan terhormat.

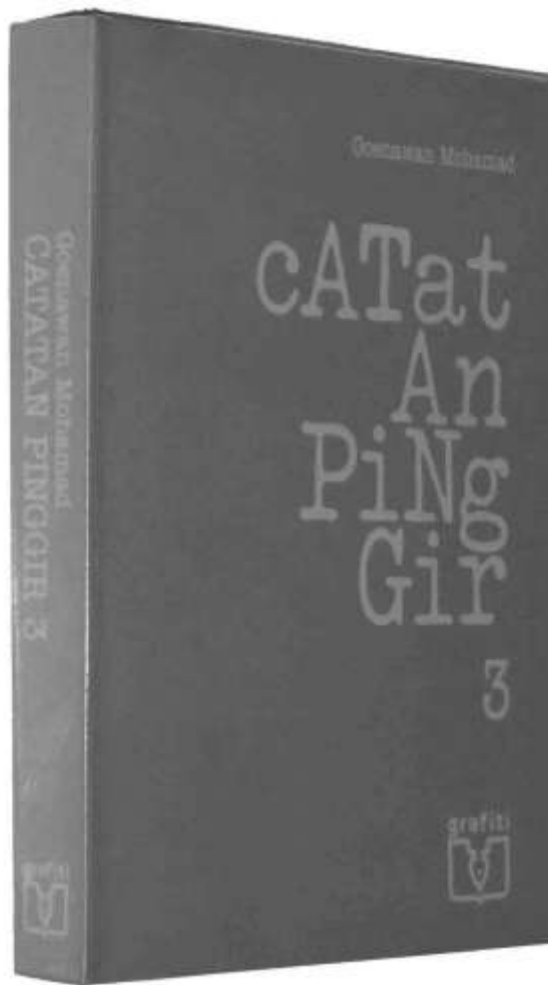
Setelah berakhirnya masa kerja Kabinet Pembangunan III, Fuad kemudian dipercaya kembali memimpin Depdikbud (1988-1993). Dan dalam dua masa kepemimpinan itu terlihat dengan jelas adanya perbedaan kebijakan pendidikan dan kebudayaan yang dijalankan Fuad Hasan.



Gambar 2

Fuad Hasan semasa menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sedang membuka Pameran Lukisan Paris Jakarta 1950-1960

*Sumber:* [http://arsip.galeri-nasional.or.id/documentations/11917/detail\\_file](http://arsip.galeri-nasional.or.id/documentations/11917/detail_file).



Gambar 3

*Catatan Pinggir 3* karya Goenawan Mohamad. Dalam subbab pembahasannya, Goenawan mengungkap kesan mendalamnya terhadap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sekaligus dosennya di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

*Sumber:* Goenawan Mohamad, 1991.

Apiknya performa Fuad Hasan sebagai pendidik dan larut dalam birokrasi pendidikan, pernah diabadikan oleh murid terbaiknya - juga jurnalis *Tempo*. Goenawan Moehamad memang pernah menjadi mahasiswa Fuad di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. “Dosen kurus berpakaian putih-putih itu bernama Fuad Hasan. Kini dia Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Saya tak tahu bagaimana kelak dia akan dikenang sebagai seorang menteri dalam sejarah, tapi dia akan tetap

saya ingat sebagai seorang guru dari jenis yang punya jejak panjang”, demikian gores ingatan Goenawan dalam *Catatan Pinggir 3*.<sup>41</sup>

Puja-puji yang dilayangkan Goenawan, menurutnya bukan isapan jempol. Fuad menurutnya, bukan sekadar sosok yang pintar di depan kelas, juga memiliki kelebihan-kelebihan lainnya. “Guru jenis ini bisa menggugah minat. Ia bisa merangsang keasyikan menalar hingga kitapun jadi tekun menggunakan kapasitas pemikiran kita untuk memecahkan soal”, lanjut Goenawan dalam *Catatan Pinggir 3* dalam sub judul “Guru”.

Bila dilihat dari tulisan-tulisan Goenawan, terutama pada tokoh nasional hingga orang yang dikagumi, jarang dia memberi pujian untuk sosok yang mampu mengubah paradigma hidupnya. Hingga dalam akhir tulisannya, mantan Pemred *Tempo* ini menegaskan, tidak seluruh guru bermental sama dengan Fuad Hasan. Bukan tanpa alasan, bila Goenawan kemudian memperkuat argumentasinya, “Ia menghidupkan generator dalam diri kita untuk menjelajahi cakrawala pengetahuan dan menjelajahi cakrawala adalah proses yang tak habis-habisnya. Karena itu jejaknya panjang.”.

### **C. Pemikiran Fuad Hasan untuk Pendidikan dan Kebudayaan**

“Naik di tengah jalan” menyebabkan Fuad Hasan tidak membuat perubahan besar pada tahun-tahun pertama kepemimpinannya. Bahkan dia berjanji tidak akan menjadikan anak didik sebagai kelinci percobaan, seperti pameo yang berkembang di tengah masyarakat “ganti pejabat, ganti kebijakan”. Menyikapi heboh mengenai PSPB yang dicanangkan Nugroho Notosusanto, Fuad Hasan lebih memiliki sikap meredam kehebohan itu. Tidak banyak pernyataan yang dia keluarkan sehubungan dengan kebijakan tersebut. Sebagai gantinya, Fuad lebih memilih berkonsentrasi bagi penuntasan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang akan menjadi dasar Sistem Pendidikan Nasional.<sup>42</sup>

Pada masa jabatannya, Fuad Hasan telah merancang dan melahirkan beberapa kajian strategis, yang nantinya berpengaruh terhadap kurikulum pendidikan. Fuad

---

<sup>41</sup> Goenawan Mohamad, *Catatan Pinggir 3* (Jakarta: Grafiti, 1991).

<sup>42</sup> Darrmaningtyas, *Pendidikan Yang Memiskinkan* (Yogyakarta: Galan Press, 2004), hal. 76.

yang berlatar belakang psikologi, pada masa jabatannya memberi porsi terbesar terhadap ilmu-ilmu humaniora dalam kurikulum. Salah satu kebijakan Fuad yang masih mempertahankan kurikulum sebelumnya adalah dalam mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB), yang dirancang Nugroho Notosusanto.

Hadirnya mata pelajaran PSPB sejak tahun 1984, memang memberi warna tersendiri dalam dunia pendidikan. Meski ada yang menuding, kemunculan mata pelajaran ini sarat dengan nuansa politik, pelanggaran kekuasaan Orde Baru, dan menasionalisasikan masalah internal ABRI, namun hadirnya PSPB telah menegaskan pentingnya pengayaan terhadap nilai-nilai kesejarahan, terutama pada peserta didik itu sendiri.

Dua tahun masa jabatannya, kembali Fuad Hasan merancang kebijakan strategis. Fuad mengungkap gagasan pelaksanaan Evaluasi Belajar Tahap Akhir Tingkat Nasional (EBTANAS) dilaksanakan secara desentralisasi di tahun-tahun mendatang, pada tanggal 1 Juli 1987. Gagasan ini digelontorkan Fuad, dengan tujuan menyempurnakan sistem ujian akhir di sekolah-sekolah.<sup>43</sup>

Selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Fuad Hasan memiliki alasan tersendiri menerapkan idenya ini. “Pelaksanaan Ebtanas secara sentralisasi yang dilakukan selama ini merupakan pekerjaan raksasa dan banyak mengandung kerawanan”, demikian ungkap Fuad kepada wartawan di Bina Graha Jakarta, setelah melapor kepada Presiden Soeharto.<sup>44</sup> Selain itu, pelaksanaan Ebtanas dengan tersentralisasi, telah membuat jurang pemisah antara pusat dan daerah menjadi besar. Kepada jurnalis *Antara*, Fuad Hassan mengakui, timbulnya gagasan desentralisasi Ebtanas itu dipicu banyaknya keluhan tentang pelaksanaan ujian akhir, yang dirasakan memberatkan peserta.

Fuad mengatakan bahwa ide desentralisasi Entanas sudah disampaikan kepada Presiden Soeharto, dan langsung diamini sang presiden. Bahkan, Soeharo ingin agar Mendikbud selekasnya membuat penelitian dan pengkajian atas rencana desentralisasi Ebtanas. Untuk menindaklanjuti gagasannya, Fuad berencana

---

<sup>43</sup> *Antara* tanggal 2 Juli 1987.

<sup>44</sup> Team Antara, *Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita*. Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hlm. 672-673.



menggulirkannya dalam rapat kerja nasional Depdikbud yang dilaksanakan tanggal 13-15 Juli 1987.

Saat itu Fuad menegaskan bahwa bila gagasan desentralisasi ujian Ebtanas berhasil dilaksanakan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpinnya tentu bisa menekan biaya pelaksanaan ujian Ebtanas yang kian membengkak. “Pengkajian yang akan dilakukan itu diharapkan dapat mengetahui apakah sistem desentralisasi tidak akan lebih mahal biayanya, mengingat sangat luasnya wilayah Indonesia”, demikian tegas Fuad di depan wartawan dalam jumpa pers.

Satu hal yang menjadi catatan Mendikbud untuk gagasan desentralisasi adalah untuk menggaransi mutu sekolah tetap terjaga. Ia meyakini sentralisasi ujian akhir memang telah memperbesar jurang antara sekolah yang berada di perkotaan dengan di pedesaan. Fuad tentu mempunyai alasan tersendiri melihat persoalan yang berlarut-larut itu, telah menjadi momok besar dalam dunia pendidikan.

Selain persoalan desentralisasi Ebtanas, Fuad melihat ada kecenderungan baru di kalangan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang memilih sekolah kejuruan seperti STM dan SMEA, dibandingkan melanjutkan pendidikannya di SMA.<sup>45</sup> “Kalau dugaan itu benar, ini gejala baik, sebab dengan begitu calon-calon yang akan memasuki perguruan tinggi lebih terseleksi,” ungkap Fuad kepada wartawan *Antara*.

Mendikbud memandang fenomena ini sebagai langkah maju dari peserta didik, yang lebih memilih program studi praktis serta condong mencari pekerjaan, ketimbang meneruskan studi di perguruan tinggi negeri. Dari data yang diperoleh *Antara*, memang terjadi penurunan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru) tahun 1987, yang diikuti 454.184 lulusan SLTA. Jumlah ini berkurang hampir 15% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 600.000 orang. “Depdikbud akan meneliti sebab-sebab menurunnya jumlah peserta Sipenmaru itu. Namun dugaan sementara adalah mulai banyaknya lulusan SLTA yang lebih memilih program studi praktis serta condong mencari pekerjaan ketimbang meneruskan studi di perguruan tinggi negeri”, ungkap Fuad lebih lanjut kepada *Antara*.

---

<sup>45</sup> *Antara* tanggal 15 Agustus 1987.

Pada jenjang pendidikan tinggi Fuad Hasan melakukan beberapa perubahan. Dua perubahan yang cukup penting dan sangat berkesan dalam sejarah pendidikan tinggi Indonesia adalah perubahan pola seleksi masuk perguruan tinggi dan perubahan pemakaian gelar kesarjanaan. Pola seleksi masuk perguruan di Indonesia yang dilakukan pada era Fuad Hasan cukup signifikan perubahannya dibandingkan dengan pola seleksi penerimaan mahasiswa baru pada kurun waktu sebelumnya.

Pada periode sebelumnya pola seleksinya dinamakan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru). Di samping menerima calon mahasiswa lewat tes tertulis juga ada penerimaan mahasiswa tanpa tes yang dikenal dengan nama Penelusuran Minat dan Keahian (PMDK). Pola penerimaan ini dianggap kurang adil karena penerimaan mahasiswa lewat jalur PMDK tidak berlaku untuk semua perguruan tinggi. Dengan alasan itu, ditambah dengan sejumlah alasan lainnya, maka tahun 1989 diputuskan untuk mengganti pola penerimaan mahasiswa baru dengan nama Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN). Dari sejarah seleksi penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri di Indonesia diketahui bahwa pola penerimaan ala UMPTN inilah yang paling lama dipakai (sampai tahun 2001). Melalui pola penerimaan ini seleksi penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi. Namun karena banyaknya perguruan tinggi yang ikut-serta dalam kegiatan ini, maka untuk mempermudah peserta ujian, maka pelaksanaan unjian dikoordinasikan dalam tiga rayon, yakni Rayon A, Rayon B, dan Rayon C. Rayon A meliputi PTN yang ada di wilayah Sumatera, Kalimantan Barat, DKI Jakarta dan Jawa Barat. Rayon B mencakup PTN yang berada di wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Sedangkan Rayon C meliputi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya (Papua). Seleksi penerimaan mahasiswa baru ini diselenggarakan secara bersamaan dengan sosial yang sama atau setara. Hal menentukan diterima atau tidaknya calon adalah nilai kelulusan yang ditentukan oleh masing-masing lembaga yang dipilih calon mahasiswa. Tinggi atau rendahnya nilai kelulusan itu tergantung pada “nilai” dari Program Studi atau Fakultas yang bersangkutan.

Kebijakan lain dari Mendikbud Fuad Hasan yang masih berhubungan dengan mahasiswa adalah pencabutan kebijakan NKK/BKK. Kebijakan yang pernah heboh di era Daud Joesoef itu dicabut oleh Fuad dan diganti dengan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan (PUOK). Melalui PUOK yang ditetapkan berdasarkan SK Mendikbud No.0457/U/1990 ini ditetapkan bahwa organisasi kemahasiswaan intra kampus yang diakui adalah Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT), yang didalamnya terdiri dari Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Alasan dikeluarkannya kebijakan tersebut adalah untuk merespon tuntutan mahasiswa agar mahasiswa diberikan ruang untuk bergerak dan Dema dihidupkan kembali. Pemerintah melalui Menteri P dan K Fuad Hasan mempersilahkan mahasiswa terus bergerak, tetapi jangan menggunakan kata Dema karena organisasi tersebut telah dibekukan. Sebagai penggantinya, pemerintah menawarkan konsep SMPT dengan memposisikan mahasiswa sebagai mitra pimpinan universitas dan bukan berdiri sendiri seperti Dema. Dalam aturan ini, semua organisasi mahasiswa di perguruan tinggi harus memiliki corak yang sama dan satu-satunya yang diakui yaitu SMPT (Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi).

Perubahan lain yang juga dilaksanakan pada masa kepemimpinan Fuad Hasan adalah perubahan penamaan gelar kesarjanaan, terutama untuk gelar sarjana strata 1. Ada dua inti dari perubahan itu, pertama mengakhiri pemakaian gelar yang berbau kebelanda-belandaan atau kebarat-baratan menjadi bernuansakan Indonesia, dan kedua menyesuaikan penamaan atau pemakaian gelar kesarjanaan dengan kaidah bahasa Indonesia yang sekaligus menyebutkan bidang ilmu dalam bahasa Indonesia dari kesarjanaan pemegang gelar. Kebijakan Fuad ini sekaligus mengakhiri pemakaian gelar doktorandus (Drs.) dan gelar doktoranda (Dra.), sebagai bentuk feminim dari Drs, serta gelar insinyur (Ir). Gelar-gelar ini telah dipakai sejak zaman kolonial Belanda dan digunakan untuk berbagai bidang ilmu dari penyandang gelar tersebut. Gelar Drs. atau Dra. bisa saja dipakai oleh sarjana sejarah, geografi, arkeologi, bahasa atau sastra, sarjana politik, sosiologi, filsafat, ushuludin, tarbiyah, dlsnya. Gelar Ir. juga dipakai oleh sarjana berbagai bidang ilmu, mulai dari teknik, pertanian, peternakan, dlsbnya. Pemakaian gelar ini diganti dengan menyebutkan sarjana di depan bidang ilmu yang disandang, namun berdasarkan kelompok bidang/rumpun

ilmu. Seperti Sarjana Humaniora, Sarjana Teknik, Sarjana Pendidikan, Sarjana Pendidikan Islam, dlsbnya.

Walaupun sempat menjadi heboh pada masa awal diperkenalkan, secara lambat amun pasti, perubahan ini diterima oleh masyarakat kampus dan umum. Apalagi, sebetulnya, pada masa sebelum perubahan ini dilakukan pola pemakaian gelar dengan menyebut sarjana dan bidang ilmu telah dikenal juga, seperti sarjana hukum (SH).

Masalah kebudayaan juga menjadi perhatian utama oleh Fuad Hasan, bahkan perhatian itu telah hadir sejak hari-hari pertama dia diamanahi jabatan menteri. Perhatian itu diwujudkan dalam penataan atau perumusan ulang kebijakan kebudayaan yang menjadi tanggung jawab dari Direktorat Jenderal Kebudayaan. Rumusan kebijakan yang kemudian dikenal dengan Pokok-pokok Kebijakan Pengelolaan Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu diluncurkan tahun 1986, dan mencakup delapan aspek/unsur. Kedelapan aspek/unsur budaya yang dimaksud terdiri dari: 1). Kepurbakalaan; 2). Kesejarahan; 3). Nilai Tradisional; 4). Kesenian; 5). Kebahasaan dan Kesastraan; 6). Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 7). Permuseuman; serta (8) Perpustakaan dan Perbukuan.<sup>46</sup> Kebijakan inilah yang kemudian menjadi acuan bagi keberadaan kelembagaan kebudayaan di pemerintahan. Artinya kedelapan unsur kebudayaan inilah yang dijadikan sebagai landasan atau dasar dari pembentukan lembaga-lembaga kebudayaan di berbagai level atau instansi pemerintah.

Fuad Hasan juga memprakarsai renivasi Galeri Nasional. Fuad juga mengganti nama Galeri Nasional menjadi “Gedung Pameran Seni Rupa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan”. Renovasi Galeri Nasional ini elesai tahun 1994, saat Mendikbud dijabat oleh Wardiman Dojojonegoro.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Aspek-aspek ini cukup berbeda dari Pokok-pokok Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan yang dirumuskan sebelumnya (1980) yang hanya mencakup lima aspek/unsur dan bersifat relatif umum. Kelima aspek itu adalah: 1). Bidang Kemasyarakatan, yang sasarannya diarahkan pada penanaman kesadaran berbangsa, pengukuhan jati diri dan pendorongan tumbuhnya kebanggaan nasional; 2). Bidang Bahasa; (3) Bidang Kesenian; 4). Bidang Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa; dan 5). Bidang Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan.

<sup>47</sup> Wardiman Djojonegoro, *Sepanjang Jalan Kenangan: Bekerja dengan Tiga Tokoh Besar Bangsa* (Jakarta: Kepustakaan Popuer Gramedia, 2016), hal. 428.

*Concernnya* Fuad Hasan dalam dunia pendidikan, juga bisa ditelusuri dalam beberapa karyanya, berupa makalah dan buku. Dalam sebuah makalah seminar yang dipresentasikan tanggal 15 Februari 1987 di Universitas Indonesia, Fuad menegaskan, bahwa pendidikan merupakan nilai tambah bagi kebudayaan, dimana manusia menjadi tercerahkan dan merdeka dalam situasi pendidikan. Dengan kata lain, pendidikan bukan saja upaya pengalihan pengetahuan (*transfer of knowledge*), melainkan juga pengalihan nilai-nilai budaya (*transfer of cultural values*).<sup>48</sup>

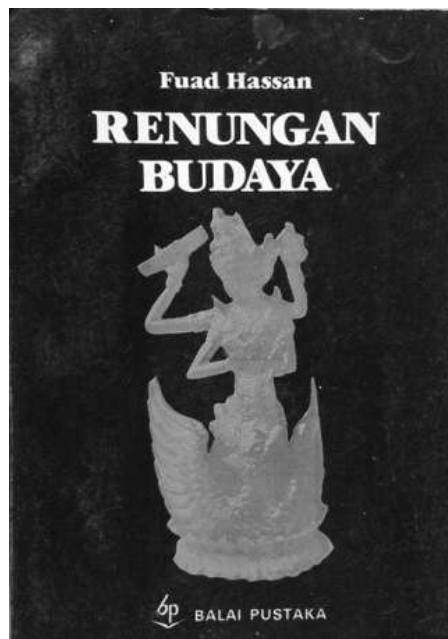
Khusus pemikiran Fuad Hasan mengenai kebudayaan bisa dijumpai dalam beberapa karyanya. Pendapatnya mengenai seputar asal-usul budaya Nusantara diuraikan cukup lengkap, untuk menggambarkan kekayaan budaya Nusantara dari sisi unsur-unsurnya bisa ditelusuri dalam karya Koentjaraningrat berjudul *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Menurut Fuad, budaya Nusantara yang plural merupakan kenyataan hidup (*living reality*) yang tidak dapat dihindari. Kebhinekaan ini harus dipersandingkan, bukan dipertentangkan. Keberagaman ini merupakan manifestasi gagasan dan nilai sehingga saling menguat dan untuk meningkatkan wawasan dalam saling apresiasi.<sup>49</sup>

*Renungan Budaya* merupakan buku kumpulan karangan dan pidato sambutan Fuad Hassan semasa menjabat sebagai Mendikbud yang mengandung buah pikiran mendasar tentang perkembangan kebudayaan dewasa ini di tanah air. Pengertian kebudayaan menurut perspektif Fuad, ditangkap dalam aspeknya yang luas sehingga mencakup bidang-bidang kehidupan yang lebih menitik beratkan daripada sektor-sektor seni sastra belaka. Sangkutan yang mendalam dalam kebudayaan mengajak kita berbincang mengenai pendidikan nasional, disiplin nasional dan sosial, kependidikan dan lingkungan hidup, ilmu dan teknologi, sejarah, pertahanan dan keamanan, yang semuanya itu dirangkum dalam penglihatan yang berinti pada konsep kebudayaan.

---

<sup>48</sup> Fad Hasan, "Catatan Sekitar Masalah Pendidikan.", *Makalah*. Disampaikan dalam Seminar di Universitas Indonesia tanggal 15 Februari 1987.

<sup>49</sup> Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1991.



Gambar 4

*Renungan Budaya*-kumpulan pidato Menteri P&K yang diterbitkan Balai Pustaka

*Sumber:* Fuad Hasan, 1994

Tidak luput dari penglihatan Fuad adalah bidang-bidang kehidupan yang lebih dekat pada estetika yang pada intuisi umum selalu melekat pada pengertian kebudayaan, yakni seni, sastra, film dan bahasa. Uraian-uraian di dalam buku ini adalah hasil dari renungan budaya Fuad, dalam arti bahwa batas-batas pikirannya tidak terikat pada sistem yang terlalu ketat, tetapi bagaimanapun juga berlandas pada suatu pandangan hidup yang bernilai filsafat.

Cinta Fuad Hasan terhadap dunia pendidikan, kebudayaan, dan filsafat, juga bisa ditelusuri dalam beberapa tulisannya. Salah satu karyanya yang menarik diikuti adalah buku berjudul *Berkenalan Dengan Eksistensialisme*, diterbitkan oleh Pustaka Jaya, yang istimewa adalah bahwa sampai tahun 2005, buku ini telah menunjukkan cetakan ke-9. Cetakan ke -1 tahun 1973, ke-2 tahun 1976, ke-3 tahun 1985, ke-4 tahun 1989, ke-5 tahun 1992, ke-6 tahun 1994, ke-7 tahun 1997, ke-8 tahun 2000, dan ke-9 tahun 2005. *Berkenalan Dengan Eksistensialisme* setebal 144 halaman ini, merangkum dan menjelaskan buah pikir para filsuf dunia termasuk : Kierkegaard, Nietzsche, Berdyaev, Jaspers, dan Satre.

Beberapa karya dari Fuad Hasan yang berhubungan dengan filsafat, psikologi, dan sastra adalah *Pengantar Filsafat Barat* (1995), *Apologia*, terjemahan karya Plato

disertai pengantar tentang filsafat, *Neurosis sebagai Konflik Eksistensial* (1967, disertasi), dan *Kita dan Kami* (2007).

Sebagai seorang pecinta seni, Fuad Hasan juga memiliki pandangan yang tinggi pada dunia seniman. Dia melihat bahwa seniman adalah sosok-sosok pecinta damai. Sewaktu menjabat Mendikbud dan didapuk menjadi salah seorang pembicara dalam diskusi Polemologi (Ilmu Perdamaian) di Yogyakarta, Fuad Hasan pernah berseloroh dengan mengatakan: “Kalau mau perang, kumpulkanlah seribu seniman untuk membicarakan soal strategi perang yang akan diakai, nanti hasilnya tidak akan pernah terjadi perang. Sebaliknya, kalau ini damai, kumpulkanlah seribu diplomat untuk membicarakan soal strategi damai, nanti hasilnya adalah tidak pernah akan damai, tatpi malah peran terus”.<sup>50</sup>

Fuad Hasan termasuk salah satu menteri yang memperlihatkan keprihatinannya akan minimnya pengajaran seni di berbagai jenjang pendidikan. Dia menyadari betul bahwa pelajaran seni telah lama hilang dalam dunia sekolah. Kalaupun ada pelajaran seni, maka alokasi waktunya terlalu sedikit. Penyediaan waktu yang agak banyak pada pelajaran ini hasil di sekolah-sekolah yang khusus mempejarkan seni. Dan itu bukan termasuk sekolah yang favorit di mata sebagian besar anak bangsa. Sebagai menteri Fuad Hasan sendiri termask gagal menambahkan porsi seni dalam alokasi waktu pelajaran di berbagai jenjang sekolah.

---

<sup>50</sup> Darmaningtyas, *Pendidikan yang Memiskinkan*, hal. 82.

## --- VI ---

### **PROF. DR (ING) WARDIMAN DJOJONEGORO: PEMRAKARSA *LINK AND MATCH* (1993-1998)**

#### **A. Masa Kecil dan Jenjang Pendidikan**

Wardiman Djojonegoro, demikian lengkap nama laki-laki kelahiran Pamekasan, Madura pada tanggal 22 Juni 1934.<sup>51</sup> Ia merupakan anak ketiga dari sebelas bersaudara. Meski pun memiliki saudara yang banyak, tidak sulit bagi ayahnya untuk menyekolahkan Wardiman dan saudara-saudaranya. Karena secara ekonomi dan sosial, ayahnya termasuk kelompok mampu dan terpandang. Ayah Wardiman adalah Kepala Sekolah *Hollandsch Inlandsche School* (HIS).

Sebagai kepala sekolah ayah Wardiman sering pindah tugas. Seringnya pindah tersebut dapat dilihat dari masa penempatan di suatu daerah yang hanya sekitar dua tahun. Sebagai konsekuensinya, mereka mesti pindah setiap dua tahun sekali ke kota yang berbeda. Imbasnya tentu berpengaruh Djojonegoro dan juga beberapa saudaranya.



---

<sup>51</sup> Wardiman Djojonegoro, *Lima Tahun Mengemban Tugas Pengembangan SDM: Tantangan yang Tiada Henti* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), hlm. 3.



Gambar 1 Wardiman Djojonegoro semasa menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1993-1998.

*Sumber:* *Tempo* tanggal 20 Mei 1996.

Pengaruh yang paling nyata adalah beragamnya kota di mana Wardiman mengecap pendidikan. Wardiman mengatakan bahwa dia menempuh pendidikan sekolah dasar dan menengah di sejumlah kota, mulai dari Pemalang (Jawa Tengah), Samarinda dan Balikpapan (Kalimantan), Pamekasan (Madura), serta Malang dan Surabaya (Jawa Timur). Perasaan Wardiman yang selalu mengikuti rutinitas ayahnya di beberapa daerah, memang cukup berpengaruh terhadap pembentukan karakter dan kepribadiannya. Wardiman menjadi sosok yang terbuka.

Wardiman menamatkan Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 1953 di Surabaya. Setamat dari SMA, pada September 1953, ia memilih jurusan Teknik Mesin Universiteit Indonesia di Bandung (Institut Teknologi Bandung dewasa ini), guna melanjutkan studinya. Wardiman diterima tanpa tes masuk (karena memang tidak ada tes masuk), bahkan dia mendapat beasiswa R. 250,- per bulan. Pada bulan Mei 1954, Wardiman menyelesaikan ujian tingkat pertama (*propadeuse 1: P1*) dengan hasil sangat memuaskan, dia lulus untuk 11 mata uian yang diikuti. Itu adalah sebuah keberhasilan yang dianggap luar biasa, karena saat itu jarang sekali mahasiswa yang bisa menyelesaikan P-1 dalam masa sembilan bulan. Tahun 1955 Wardiman melanjutkan studinya ke Negeri Belanda dengan beasiswa Bank Industri Indonesia (BIN). Menurut Wardiman, ide untuk menimba ilmu di luar negeri ini muncul setelah dia mendengar B.J. Habibie mengatakan bahwa dia ingin studi di luar negeri. Di Belanda Wardiman menuntut ilmu di *Technische Hogeschool Delft* (TH Delft), pada jurusan Arsitektur Perkapalan.<sup>52</sup>

Pada saat itu, konflik Indonesia-Belanda tentang Irian Barat (Papua) tengah menghangat. Konflik tersebut akhirnya menyebabkan pemerintah Indonesia melahirkan kebijakan menarik pulang semua mahasiswa Indonesia yang tengah belajar di Negeri Kincir Angin itu. Wardiman pun harus meninggalkan Delft pada tahun 1958. Semangat untuk belajar di luar negeri mengantarkan Wardiman ke Jerman Barat. Dia kemudian melanjutkan studinya di *Rheinisch-Westfaelische*

---

<sup>52</sup> Wardiman Djojonegoro, *Sepanjang Jalan Kenangan: Bekerja dengan Tiga Tokoh Besar Bangsa* (Jakarta: Gramedia, 2016), hlm.9.

*Technische Hochschule* di Aachen, dan memperoleh gelar Diplom Ingenieur (Dilp. Ing.) pada bidang Teknik Mesin pada tahun 1962.

Beberapa tahun kemudian, Wardiman kembali ke TH Delft dan pada tahun 1985 berhasil mempertahankan disertasi dengan judul: *Shipping As A Decisive Parameter In Indonesia's Energy Source Development "Policies For The Shipbuilding Industry"*. Setelah menamatkan pendidikannya di Delft, dia memilih kembali ke Indonesia.

## **B. Kebijakan Dalam Bidang Pendidikan**

Pengalaman awal kerja Wardiman, dimulai di Bank BAPINDO (1963-1967), dan kemudian bergabung dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dari tahun 1966-1979. Tidak lama setelah Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi dibentuk, Wardiman diangkat menjadi Asisten Menteri I Riset dan Teknologi (1979-1988). Tugas ini melibatkannya pada tugas-tugas di BPPT sebagai Direktur Analisa Sistem (1981-1982) dan sebagai Deputi Ketua BPPT untuk Bidang Administrasi (1982-1993). Dan, pada tahun 1993 Wardiman diangkat oleh Presiden Soeharto menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Pembangunan VI.

Dalam memoarnya, Wardiman menulis, "Seandainya ada suatu hari yang paling berkesan dalam seluruh kehidupan, hari itu adalah ketika untuk pertama kalinya saya menerima telepon dari Bapak Presiden, yaitu mendapat penugasan untuk memimpin suatu departemen yang besar di Republik tercinta ini". Penunjukkan tersebut membuat hatinya bergetar.<sup>53</sup>

Beberapa saat setelah menerima tugas sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, muncul perasaan haru, terhormat, bangga serta beruntung. Wardiman mulai masuk kantor sehari setelah dilantik dan hari kedua mulai melakukan orientasi. Saat itu dia sadar bahwa departemen yang dia pimpin adalah sebuah lembaga yang sangat besar dan kompleks. Karena itu, seperti yang ditulisnya dalam otobiografinya, Wardiman menyebut bahwa Depdikbud itu ibarat "gajah dengan tujuh kaki". Gajah berjalan lambat karena masing-masing kaki berjalan sendiri-sendiri.<sup>54</sup> Ada beberapa hal yang menyebabkan Wardiman melahirkan penilaian ini, dua di antaranya.

---

<sup>53</sup> Wardiman Djojonegoro, *Lima Tahun.....*, hlm. 5.

<sup>54</sup> Wardiman, *Sepanjang Jalan Kenangan...*, hal. 278.

Pertama, Depdikbud memiliki jalur birokrasi yang kompleks dan rumit, baik secara horizontal, vertikal maupun spasial. Sehingga, permasalahannya pun sangat luas dan relatif berat. Kedua, Depdikbud memiliki pakar dan ahli yang paling banyak jumlahnya, sehingga kesulitan besar yang akan ditemuinya adalah menyelaraskan gagasannya dengan pemikiran bawahannya.

Dibandingkan dengan para pendahulunya yang berlatar belakang pendidikan eksakta, Wardiman Djojonegoro memiliki pemahaman yang cukup unik, terutama dalam menyelaraskan kemampuan peserta didik dalam berhadapan dengan tantangan globalisasi. Dalam memahami kebijakan sebelumnya, Wardiman memang banyak belajar dari jejak para pendahulunya, terutama dari awal kebangkitan Orde Baru. Dengan kata lain, kebijakan awal di Depdikbud tidaklah harus dimulai dari nol, karena menteri-menteri terdahulu telah meletakkan filosofinya.

Segala kekuatan pemikiran yang dimilikinya, kemudian bersinergi dengan kebijakan sebelumnya sehingga masalah-masalah yang masih ada perlu dipecahkan dengan gagasan-gagasan yang perlu diperbaharui. Dipahami pula bahwa menerapkan gagasan-gagasan yang lebih akurat dalam pembangunan pendidikan di masa depan, diperlukan penelusuran pengalaman ke belakang sejauh mungkin. Situasi politik, ekonomi, budaya dan teknologi terus berkembang sejalan dengan perubahan aspirasi, cita-cita, dan harapan sehingga melahirkan tantangan-tantangan yang juga terus berkembang seolah tanpa batas.

Penelusuran sejarah pendidikan di negeri ini ditulis secara pribadi oleh Wardiman dalam *Fifty Years Development of Indonesian Education*. Dalam karya tersebut, Wardiman menyebut bahwa pendidikan pada awal zaman kemerdekaan (1945-1968) diselenggarakan sesuai dengan kondisi pada waktu itu, yaitu perjuangan bangsa mempertahankan dan pengisian kemerdekaan sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 sampai tahun 1968.<sup>55</sup> Pada periode itu, sistem pendidikan masih sangat bervariasi serta ditandai oleh keragaman sistem dan tujuan pendidikan dari berbagai kelompok masyarakat yang berbeda-beda. Pada periode tersebut, Wardiman menyatakan tidak banyak yang dapat dipelajari dari pengalaman dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan karena upaya pembangunan nasional yang

---

<sup>55</sup> Wardiman Djojonegoro, *Fifty Years Development of Indonesian Education* (Jakarta:Ministry of Education and Culture, 1997), hlm. 17.

sistematis boleh dikatakan belum dimulai secara utuh. Namun, satu hal yang dapat dipelajari dari kurun waktu tersebut ialah bahwa pembangunan sistem pendidikan dan kebudayaan yang dipengaruhi oleh situasi politik yang belum stabil menyebabkan pembangunan pendidikan tidak mungkin berjalan lancar.

Kemudian, pendidikan selama periode Pembangunan Jangka Panjang I (PJP I) tahun 1969/1970-1993/1994 merupakan periode keemasan dalam pembangunan pendidikan di tanah air. Kesempatan belajar pada setiap jenis dan jenjang pendidikan terus diperluas. Jumlah sekolah dasar tumbuh hampir 10 kali lipat dari 17.848 pada tahun 1940 menjadi sekitar 173.000 pada tahun 1993/1994 dengan angka partisipasi sebesar 109 persen. Sementara, jumlah sekolah lanjutan tingkat pertama tumbuh 84 kali lipat dari 322 pada tahun 1945 menjadi 26,9 ribu pada tahun 1993/1994 dengan angka partisipasi sebesar 55 persen. Kemudian, untuk sekolah menengah atas bertambah 400 kali lipat dari 27 buah pada tahun 1940 menjadi 79 buah pada tahun 1945, dan 10,7 ribu buah pada tahun 1993/1994 dengan angka partisipasi sebesar 43 persen. Sejak tahun 1945, jumlah perguruan tinggi tumbuh dari 38 menjadi 1.228 perguruan tinggi negeri dan swasta dengan jumlah mahasiswa lebih dari 2 juta orang pada tahun 1993/1994, dengan angka partisipasi sebesar 9,5 persen.<sup>56</sup>

Pada masa lima tahun masa kerjanya, terdapat tiga fokus program dan kebijakan yang dilakukan oleh Wardiman Djojonegoro.<sup>57</sup> Pertama, aspek perluasan kesempatan belajar, sebagai suatu proses yang sistematis dan berkesinambungan yang dilakukan sejak awal PJP I. Perluasan kesempatan belajar ini dilakukan dengan cara meningkatkan wajib belajar sembilan tahun (Wajar Dikdas 9 Tahun). Hal ini sesuai dengan amanat UU Nomor 2 Tahun 1989 yang mengonsepsikan pendidikan dasar bukan hanya SD 6 tahun, tetapi ditambah dengan SLTP 3 tahun. Kedua, untuk melanjutkan kerangka landasan yang telah dibangun oleh menteri-menteri terdahulu dalam upaya meningkatkan mutu, beberapa kelanjutan program diperkenalkan oleh Wardiman seperti; pembinaan sekolah unggulan, peningkatan sarana dan prasarana yang lebih memadai, pengembangan LPTK, dan peningkatan kualifikasi pendidikan guru. Program pascasarjana dan kegiatan penelitian dan pengembangan juga dikembangkan di perguruan tinggi dalam rangka menunjang ilmu pengetahuan dan

---

<sup>56</sup> Wardiman Djojonegoro, *Fifty Years Development of Indonesian Education...*, hlm. 117.

<sup>57</sup> Wardiman Djojonegoro, *Lima Tahun Mengemban ...*, hlm. 101.

teknologi. Ketiga, sebagai implementasi dari konsep relevansi pendidikan, maka diterapkan konsep *link and match*, yakni sebuah konsep yang menyelaraskan antara dunia pendidikan dan dunia industri.

Dari ketiga program tersebut, konsep pendidikan *link and match* (kesesuaian dan keterpaduan) menjadi program utama yang dijalankan oleh Wardiman semasa menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Konsep ini sendiri sebenarnya tidak lahir dari pemikiran Wardiman, tetapi diintrodusir dari pendidikannya di Amerika Serikat.<sup>58</sup> Adalah Prof. Karl Willenbrock, pakar pendidikan dari Harvard University Amerika Serikat, yang mengusulkan gagasan perlunya perusahaan menjadi “bapak angkat” bagi perguruan tinggi.<sup>59</sup>

Gagasan ini awalnya berangkat dari kerisauan tentang banyaknya lulusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan, baik dari segi tingkat keterampilan maupun dari segi jenis keterampilan yang dibutuhkan. Dunia pendidikan dan dunia kerja seringkali berjalan sendiri-sendiri. Menurut pengakuan Wardiman, konsep *link and match*<sup>60</sup> berangkat dari keadaan riil masyarakat. Sepanjang masa, yang dibutuhkan adalah tenaga kerja terampil, serta lulusan sekolah yang memiliki keterampilan yang memadai (sesuai). Diakui oleh Wardiman, lembaga pendidikan selama kurun waktu sejak kemerdekaan belum mampu memenuhi kedua tuntutan tersebut.

Dengan kata lain, kebijakan *link and match* merupakan kebijakan Depdikbud yang dikembangkan untuk meningkatkan relevansi pendidikan, yaitu relevansi dengan kebutuhan pembangunan umumnya dan dengan kebutuhan dunia kerja, dunia

---

<sup>58</sup> Wardiman Djojonegoro, *Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Sekolah Menengah Kejuruan* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, 1996), hlm. 39.

<sup>59</sup> Gagasan Willenbork ini, kemudian dilanjutkan Wardiman, dengan pemahaman perusahaan tidak sekadar memberi tempat berlatih, atau menyisihkan sebagian keuntungannya, tapi juga terlibat dalam pengembangan lembaga pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Dari gagasan inilah kemudian konsep *link and match* diperkenalkan secara luas di dunia pendidikan. Lebih lanjut baca Wardiman Djojonegoro, *Sepanjang Jalan Kenangan...*, hlm.203.

<sup>60</sup> Konsep *link and match*, kemudian dimasukkan sebagai terapi, untuk mengatasi. Secara praktis, perlu dikembangkan kembali sekolah kejuruan dan disusul dengan serangkaian kerja sama Depdikbud dengan perusahaan-perusahaan serta instansi-instansi yang secara riil menikmati keuntungan, misalnya dalam hal menyediakan tempat untuk pemagangan anak-anak sekolah. Termasuk di dalam rangkaian upaya ini adalah merealisasikan 20 persen kurikulum lokal. Wardiman Djojonegoro, *Pendidikan dan Kebudayaan Selayang Pandang*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, hlm. 131.

usaha dan dunia industri. Jadi, esensi dari relevansi adalah upaya menciptakan keterkaitan dan kesepadanan antara pendidikan dan pembangunan.

Wardiman dalam karya lainnya menyebut *link and match* dirasakan semakin penting karena beberapa kecenderungan.<sup>61</sup> Pertama, sejalan dengan meningkatnya pembangunan nasional maka semakin meningkat pula tingginya tuntutan dunia kerja akan tenaga kerja yang bermutu baik secara kualitas maupun kuantitas. Kedua, perubahan struktur dan persyaratan dunia kerja yang semakin kompetitif dan mengandalkan keahlian dalam bidang tertentu, tanpa mengabaikan wawasan dan pengetahuan secara interdisiliner. Ketiga, pandangan yang cenderung menganggap bahwa tujuan pendidikan hanyalah untuk pengembangan kepribadian sudah mulai bergeser menjadi cara berpikir yang memandang bahwa pendidikan semestinya menyiapkan peserta didik secara utuh, meliputi pengetahuan, sikap, kemauan, dan keterampilan fungsional bagi kehidupan pribadi, warga negara dan warga masyarakat, serta upaya mencari nafkah. Keempat, semakin populernya konsep pengembangan SDM yang mendapatkan prioritas yang tinggi. Dalam hal ini, pendidikan dipandang sebagai upaya pengembangan SDM yang berkualitas. Konsep pengembangan SDM ini mengimplikasikan bahwa pendidikan merupakan wahana untuk pembangunan dan perubahan sosial, dan pendidikan juga merupakan investasi untuk masa depan.

Implementasi *link and match* tersebut, bisa ditelusuri dalam kurikulum pendidikan 1994. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kurikulum 1994 adalah: (1) bersifat *Objective Based Curriculum*; (2) nama SMP diganti mejadi SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) dan SMA diganti SMU (Sekolah Menengah Umum); (3) mata pelajaran PSPB dihapus; (4) program pengajaran SD dan SLTP disusun dalam 13 mata pelajaran; (5) Program pengajaran SMU disusun dalam 10 mata pelajaran; (6) Penjurusan SMA dilakukan di kelas II yang dari program IPA, program IPS, dan program Bahasa. Selain berisi pokok-pokok perubahan di atas, kurikulum 1994 juga menekankan pada pengembangan pendidikan kejuruan melalui jalur Pendidikan Sistem Ganda di sekolah-sekolah kejuruan (SMK).

---

<sup>61</sup> Wardiman Djojonegoro, *Kumpulan Pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia* (Jakarta: Pendidikan dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, 1996), hlm. 41.

Pendidikan Sistem Ganda (PSG) merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara sistematis dan sinkron program pendidikan di sekolah dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja atau praktik langsung di dunia kerja. Melalui PSG, pendidikan dapat lebih terarah untuk mencapai tingkat keterampilan atau keahlian profesional tertentu. Sedangkan tujuan PSG sendiri antara lain: (1) menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional; (2) memperkokoh *link and match* antara sekolah dengan dunia kerja; (3) meningkatkan kesanggupan proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas; dan (4) memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan.

*Link* secara harfiah berarti adanya pertautan, keterkaitan, atau hubungan interaktif, dan *match* berarti cocok, padan. Pada dasarnya *link and match* adalah keterkaitan dan kecocokan antara proses dan produk pendidikan dengan kebutuhan (*needs, or demands*). Kebutuhan ini bersifat sangat luas, multidimensional dan multisektoral, mulai dari kebutuhan peserta didik, kebutuhan keluarga, kebutuhan masyarakat dan negara, dan kebutuhan pembangunan termasuk kebutuhan dunia kerja.<sup>62</sup>

Pada jenjang pendidikan dasar, *link and match* ditujukan untuk pembentukan pribadi yang berbudi pekerti luhur, beriman dan bertakwa, berkemampuan, dan mempunyai keterampilan dasar untuk pendidikan selanjutnya di tingkat menengah, dan untuk bekal hidup. Penekanan terakhir ditujukan untuk memperoleh keterampilan dasar sebagai bekal hidup yang belum sepenuhnya mengarah pada bidang kejuruan atau pekerjaan tertentu, tetapi merupakan keterampilan dasar untuk belajar yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

Dengan konsep *link and match*, lulusan pendidikan dasar adalah mereka yang mampu belajar tetapi tidak seharusnya dianggap memiliki keterampilan kerja dan

---

<sup>62</sup>Dari perspektif ini, *link* lebih menunjuk pada proses yang berarti bahwa proses pendidikan seharusnya sesuai dengan kebutuhan pembangunan sehingga hasilnya juga *match* atau cocok dengan kebutuhan pembangunan dilihat dari jumlah, mutu, jenis maupun waktu. Dengan demikian, konsep *link and match* pada dasarnya adalah *supply and demand* dalam arti luas, dunia pendidikan sebagai lembaga yang mempersiapkan SDM, dan individu, masyarakat, serta dunia kerja sebagai pihak yang membutuhkan. Kebutuhan tersebut adalah tuntutan dunia kerja atau dunia usaha yang dirasakan amat mendesak. Karena itu, prioritas *link and match* diberikan pada pemenuhan kebutuhan dunia kerja. Lebih lanjut baca Wardiman Djojonegoro, *Lima Tahun Mengemban Tugas Pengembangan SDM: Tantangan yang Tiada Henti...*, hlm. 59.

siap untuk bekerja. Tenaga terampil harus dihasilkan dari lulusan pendidikan dasar (SD dan SLTP) yang dilengkapi dengan kursus dan pelatihan yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan luar sekolah.<sup>63</sup>

Pada jenjang pendidikan menengah, *link and match*, ditujukan untuk membekali pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik agar memiliki kemampuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi atau kemampuan untuk bekerja. Konsep *link and match* pada pendidikan menengah kejuruan lebih diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang diproyeksikan menjadi tenaga kerja tingkat menengah yang terampil. Mereka diharapkan mampu mengisi kebutuhan berbagai jenis lapangan kerja sesuai dengan tingkatannya serta belajar menyesuaikan keterampilannya dengan perkembangan.

Untuk tujuan tersebut, penerapan *link and match* lebih ditujukan pada pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda (PSG). Kemudian pada pendidikan tinggi, konsep *link and match* lebih diarahkan pada peningkatan perguruan tinggi dalam menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri, baik dari segi jumlah, komposisi menurut keahlian, maupun mutu keahlian yang dimiliki. Pendidikan tinggi juga harus mampu menghasilkan lulusan yang seimbang, baik dilihat dari kemampuan profesional maupun kemampuan akademik. Kemampuan akademik menekankan pada kemampuan penguasaan dan pengembangan ilmu, dan kemampuan profesional menekankan pada kemampuan dan keterampilan kerja.<sup>64</sup>

Dalam perkembangannya, penerapan kebijakan *link and match* memang menuai banyak kritik dan kontroversi serta menyimpan dilema tersendiri. *Link and match* menjadi sebuah dilema karena di satu sisi kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat Indonesia, yang dengan demikian mampu bersaing dalam dunia kerja (usaha). Masih hangat dalam ingatan kita, sampai kini

---

<sup>63</sup> Wardiman Djojonegoro, *Lima Tahun .....*, hlm. 99.

<sup>64</sup> Dengan demikian, konsep *link and match* berlaku untuk semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Namun, perlu dicatat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan dan semakin spesifik bidang yang dipelajari, semakin tinggi pula derajat penerapan *link and match*. Seperti dijelaskan di atas, dasar kebijakan *link and match* adalah berangkat dari kebutuhan riil masyarakat terhadap dunia kerja. Sepanjang sejarah, dunia industri (usaha) membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan memadai. Tujuan *link and match* dengan demikian adalah mencetak SDM handal dan terampil yang siap mengisi kebutuhan dunia usaha. Lihat Wardiman Djojonegoro, *Lima Tahun .....*, hlm. 137.



masyarakat masih berbondong-bondong memasukkan anaknya untuk bersekolah di jenjang pendidikan kejuruan, dengan satu harapan mereka dapat lekas bekerja.

Di sisi lain, kenyataan tak selamanya akurat dengan harapan kebanyakan orang. Sebab, secara kualitas lulusan pendidikan kejuruan tidak selamanya *match* dengan kebutuhan dunia usaha yang semakin kompleks dan kompetitif. Banyak pengalaman siswa lulusan SMK Teknik Mesin, misalnya, dalam realitasnya justru bekerja sebagai staf administrasi kantor atau buruh pabrik. Sebaliknya, lulusan SMK Akutansi justru menjadi montir di bengkel mobil.

Selanjutnya, realisasi dalam praktik di lapangan juga seringkali bertolak belakang dari rencana yang diterapkan oleh pemerintah. Contoh, belum sepenuhnya janji dan kerja sama antara pemerintah dan dunia bisnis (usaha) seringkali hanya manis di atas kertas. Alhasil, kesempatan kerja lulusan pendidikan kejuruan menjadi sangat terbatas, atau bahkan nihil sama sekali. Dan, kritik mendasar yang dapat kita alamatkan pada konsep *link and match* ini adalah bahwa terkesan konsep ini hanya berorientasi ekonomis, serta meminggirkan substansi pendidikan sebagai wahana pencerdasan, ruang aktualisasi diri, proses pencarian dan penemuan jati diri, serta proses pemerdekaan (pembebasan) anak didik sesuai naluri dan keinginan mereka. Kritik ini sangat beralasan, sebab dalam naungan konsep ini, anak didik dituntut untuk mengerjakan segala sesuatu yang berdaya jangka pendek dan berorientasi target. Kita juga dapat menambahkan bahwa biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk memenuhi serangkaian konsep *link and match* juga tidak sedikit.

Kebijakan Wardiman lainnya yang juga menjad torehan sejarah dari masa kepemimpinannya di Depdikbud adalah perubahan sistem semester menjadi caturwulan dan penggantian penamaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dengan alasan bahwa dalam konsep wajib belajar sembilan tahun, SMP bukan bagian dari sekolah menengah, tetapi masuk kategori pendidikan dasar. Pada kategori sekolah menengah Wardiman hanya membentuk dua kelompok sekolah, yakni Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sekolah yang masuk kelompok SMU hanya satu saja, yakni Sekolah Menengah Atas (SMA), sedangkan sekolah-sekolah yang masuk kelompok SMK terdiri dari Sekolah Teknik Menengah (STM), Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), SMKK (Sekolah Menengah Kesejahteraan

Keluarga), Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA), Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR), Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK), dlsbnya.<sup>65</sup>

Kebijakan lain Wardiman tertuju kepada pendidikan tinggi, tetapi sesungguhnya didasarkan oleh kondisi pada pendidikan dasar dan menengah adalah memperluas IKIP menjadi universitas. Dasar dari gagasan ini adalah selama ini IKIP cenderung diberi tugas menghasilkan guru sebanyak-banyaknya, fokus pembangunan adalah pada jumlah dan kuantitas guru saja. Kompetensi dan kualitas kurang diperhatikan, hal ini antara lain dibuktikan dengan banyaknya keluhan tentang mutu guru yang masih jauh dari yang diidamkan. Karena itulah Wardiman menggagas bahwa peranan IKIP sejatinya menentukan isi kurikulum pembelajaran, memberikan perhatian yang besar pada jurusan yang kekurangan pengajar serta menyusun program pelatihan besar-besar untuk guru SD. Untuk itulah, Wardiman mengusulkan agar IKIP digabungkan dengan cabang ilmu lain agar ada “darah baru” pada lembaga tersebut. Dengan penggabungan itu format lembaga tersebut juga akan berubah dari institut menjadi universitas. Wardiman juga menegaskan bahwa perubahan IKIP menjadi universitas bukan untuk menggantikan atau membubarkan lembaga pendidikan keguruan yang sudah ada, tetapi untuk memberdayakannya.<sup>66</sup> Gagasan itu menimbulkan pro dan kontra, baik dikalangan Depdikbud atau IKIP. Namun Wardiman tetap maju dengan idenya. Dari 10 IKIP yang ada di Indonesia, ada empat IKIP negeri yang menyetujui gagasan tersebut. Keempat IKIP tersebut adalah IKIP Yogyakarta, Bandung, Malang dan Padang yang masing-masing lembaga tersebut mengubah namanya menjadi Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Malang, dan Universitas Negeri Padang.<sup>67</sup>

Wardiman juga memberikan perhatian yang besar terhadap karir guru dan kesejahteraan guru. Wardiman membuat kebijakan bahwa hanya guru yang bisa menjadi pengawas sekolah,<sup>68</sup> jabatan kepala sekolah (SD, SLTP, SLTA, dan SMK)

---

<sup>65</sup> Darmanityas, Pendidikan yang Memiskinkan. (Yogyakarta: Galang Press, 2014), hal.77-78.

<sup>66</sup> Wardiman, *Sepanjang Jalan Kenangan.....*, hal. 325, 327.

<sup>67</sup> Gagasan Wardiman ini kemudian juga diadopsi oleh Departemen Agama. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang berada dibawah naungan departemen tersebut juga berubah menjadi universitas (Universitas Islam Negeri).

<sup>68</sup> Pada periode sebelumnya posisi ini umumnya diduduki oleh mantan pejabat di lingkungan Kantor Wilayah atau kantor Depdikbud untuk menanggungnya masa pensiun mereka. Pejabat

dibatasi menjadi dua kali masa jabatan (dua kali empat tahun). Melalui kebijakan ini, Wardiman memberi peluang kepada semua guru untuk bisa menduduki posisi pengawas sekolah dan kepala sekolah.

Kesejahteraan guru juga mendapat perhatian Wardiman. Wardiman menyadari gaji guru relatif rendah. Karena itu, dia mengupayakan ada kebijakan khusus untuk guru. Upayanya itu akhir membuahkan hasil ketika Menteri Penertipan Aparatur Negara (Menpan) mengeluarkan keputusan (Kepmenpan) No. 84 Tahun 1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Inti dari keputusan itu adalah guru yang gajinya tidak seberapa tersebut diberi kemudahan naik pangkat. Dengan aturan itu guru dimungkinkan naik pangkat setiap dua tahun, dan pola naik pangkat seperti ini berlaku hingga sang guru mencapai pangkat Pembina Golongan IV/a. Untuk naik ke golongan selanjutnya guru harus mengumpulkan angka kredit. Angka kredit ini bisa diperoleh dari produktivitas mereka membuat karya ilmiah atau karya inovatif lainnya. Kebijakan ini berhasil mengantarkan sejumlah besar guru ke golongan IV/a. Sayangnya “prestasi” mereka mentok pada golongan itu. Sangat sedikit, hanya sekitar 4 %, dari mereka yang berhasil melewati golongan. Artinya, kebijakan tersebut tidak mampu meningkatkan produktivitas guru melahirkan karya-karya ilmiah dan karya-karya inovatif lainnya.

### **C. Kebijakan Dalam Bidang Kebudayaan**

Bila kebudayaan dipahami dalam arti yang lebih luas, maka Wardiman termasuk salah satu Mendikbud yang melahirkan sejumlah kebijakan yang berkesan dalam bidang kebudayaan. Wardiman sendiri menyebut bahwa gagasan untuk “memperhatikan budaya” ini telah tumbuh dan ada dalam dirinya sejak waktu yang lama, setidaknya semenjak dia bertugas dibawah Ali Sadikin di pemerintahan DKI Jakarta Raya pada awal 1970-an. Ada banyak kebijakannya yang cukup berkesan dalam sejarah Depdikbud saat itu.

Wardiman mempunyai peran yang besar dalam pemakaian bahasa Indonesia dikalangan para pengusaha, industri, pengembang, dan perbankan. Dengan kata lain, Wardiman adalah tokoh terdepan dalam kampanye pemasyarakatan bahasa Indonesia

---

struktural yang biasanya pensiun dalam usia 56 tahun, setelah diangkat menjadi pengawas sekolah akan pensiun di usia 60 tahun.

di wilayah perkotaan. Perubahan penamaan gedung, nama perumahan, bank, iklan, dan sebagainya dari semula sarat dengan bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia pasca-1995 tidak bisa dipisahkan dari ikhtiar Wardiman.

Seperti diakui oleh Taufik Ismail, Wardiman juga mempunyai peran yang besar dalam pengajaran sastra dan bahasa Indonesia di sekolah-sekolah atau kepada peserta didik. Dalam kegiatan yang diinisiasi oleh Taufik Ismail itu, program yang dinamakan Membaca, Menulis, dan Apresiasi Sastra (MMAS) para sastrawan akan berbagi pengalaman dan kisah kreatif mereka dengan para guru. Melalui pertemuan dan berbagai pengalaman tersebut tersebut diharapkan guru dapat menyukai ilmu dan pengalaman para sastrawan-sastrawan besar tanah air. Walaupun semasa Wardiman menjabat Mendikbud program ini belum terlaksana, tetapi pada masa berikutnya bisa dilaksanakan. Persetujuan Wardiman adalah pemantik utama dari terselenggaranya program ini.

Budaya baca kalangan anak bangsa yang masih rendah juga menjadi perhatian Wardiman. Karena itu, itu dalam rangka menumbuhkan budaya baca tersebut Wardiman mencanangkan adanya Bulan Buku Nasional (bulan Mei) dan Bulan Gemar Membaca (bulan September). Wardiman juga menggagas adanya Hari Kunjungan Perpustakaan, yakni tanggal 14 September. Tidak tanggung-tanggung, Wardiman melibatkan Presiden Soeharto dalam upayanya ini. Hari Kunjungan Perpustakaan itu dicanangkan langsung oleh Presiden Soeharto. Upaya menggairahkan minat budaya baca ini dilakukan pula dengan merangkul Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) yang menyelenggarakan pameran buku tiap tahun. Tidak hanya kalangan penerbit, masyarakat juga diikutsertakan dalam gerakan ini. Jimly Assidique yang didukung oleh sejumlah kalangan memelopori pembentukan Perhimpunan Masyarakat Gemar Membaca (PMGM).

Dalam upaya memberi penghargaan terhadap kreativitas pada seniman, Wardiman menggagas adanya “industri budaya”. Maksudnya seni dan budaya dikelola dan dipelakukan layaknya industri. Kesenian dilihat sebagai bagian dari “industri budaya”. Apresiasi dan penghargaan dalam bentuk uang memiliki arti penting dalam pengembangan produk seni. Hasil seni yang bermutu bisa dinikmati, dikagumi, dan dihargai oleh masyarakat, dan untuk itu produk seni yang hebat tadi

mesti “dijual” dan untuk menikmatinya harus “dibeli”. Dengan demikian ada dana yang mengalir dan ada dana yang tersedia.

Torehan sejarah lainnya yang tidak bisa dipisahkan dari nama Wardiman adalah renovasi atau bahkan pembangunan kembali Museum Nasional. Wardiman menyebut, bahwa dia ingin mengubah Museum Nasional yang *humble* menjadi Museum Nasional yang “berkelas internasional”.<sup>69</sup> Dia juga mengatakan bahwa pemugaran dan perluasan Museum Nasional sebagai prioritasnya sebagai Mendikbud. Pemugaran dan perluasan, atau menurut istilah Wardiman ‘Membuat Wajah Baru Museum Nasional’ adalah sebuah pekerjaan besar. Dibutuhkan dana yang besar dan upaya serta semangat yang gigih untuk menuntaskan pembangunan gedung ini. Wardiman menempuh berbagai macam cara, melobi ke Bapenas, Menteri Keuangan, Pemerintah daerah DKI Jaya, membujuk masyarakat yang rumah atau tempat usaha mereka akan tergusur, dlsbnya. Upaya Wardiman tidak sia-sia. Walaupun dia tidak ikut-serta dalam acara peresmian, pembangunan Museum Nasional sebagai sebuah pusat aktivitas budaya yang menarik, menyenangkan, dan berstandar internasional akhirnya bisa dituntaskan.

Masih berkaitannya juga dengan pemugaran dan peningkatan gedung tua, peranan Wardiman juga bisa dilihat pada Proyek Galeri Nasional. Proyek ini adalah juga sebuah pekerjaan besar. Banyak kendali yang dihadapi, tidak hanya masalah dana, tetapi juga persoalan non-teknis, seperti pengosongan lokasi dari para penghuni lama. Dengan berbagai pendekatan yang dilakukan, persoalan ini bisa dituntaskan. Dan dengan dukungan dana serta bantuan non-material lainnya dari berbagai pihak dan instansi, proyek ini bisa dituntaskan. Dan diresmikan pada masa kepemimpinan Wardiman.

Sebetulnya ada sejumlah ide dan gagasan lain Wardiman dalam lapangan kebudayaan. Namun, yang cukup monumental adalah yang telah disebut di atas. Walaupun begitu, ide dan gagasannya yang lain tersebut tidak bisa pula dikatakan tidak bereksan dan punya makna yang besar. Namun cukuplah sejarah yang akan mencatatnya.

---

<sup>69</sup> Wardiman, *Sepanjang Jalan Kenangan.....*, hal. 411.

## --- VII ---

### **PROF. IR. WIRANTO ARIS MUNANDAR, MS, ME: MENDIKBUD DIAWAL ERA PERUBAHAN (16 MARET - 21 MEI 1998)**

#### **A. Masa Kecil dan Pendidikan**

Wiranto Arismunandar dilahirkan di Semarang pada 19 November 1933 dari pasangan R. Arismunandar dan Sri Wurjan. Wiranto sendiri merupakan anak kedua dari lima orang bersaudara.<sup>70</sup> Sedari kecil, seluruh anak-anak Arismunandar dididik keras dan disiplin. Ayahnya memperhatikan betul pendidikan anak-anaknya, mulai dari memilih sekolah yang tepat bagi anaknya, sampai pada jurusan apa yang harus diambil demi masa depan.

Dan, usaha keras yang dilakukan Arismunandar, rupanya berhasil keseluruhannya. Kakak Wiranto bernama Artono Arismunandar merupakan teknisi elektro lulusan Institut Teknologi Bandung. Ia pernah menjabat sebagai Irjen Listrik dan Energi Baru, Departemen Pertambangan dan Energi, serta pernah mengajar di Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI).<sup>71</sup>

Kedua adik laki-lakinya bernama Budiono Arismunandar dan Wismoyo Arismunandar. Budiono, yang pernah bercita-cita menjadi penerbang, malah dianjurkan oleh ayahnya untuk belajar di akademi perkebunan. Garis hidupnya memang bagus, Budiono pernah menjabat sebagai Komisaris PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Jawa Timur, PTPN Jawa Tengah dan PTPN I Langsa, Aceh.

Berbeda dengan saudara-saudara Wiranto yang lain, Wismoyo diperbolehkan oleh ayahnya untuk masuk ke Akademi Militer Nasional (AMN) di Magelang.<sup>72</sup> Puncak karir Wismoyo adalah menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) pada masa akhir kekuasaan Orde Baru. Sedangkan dua adik perempuannya, yakni Titi

---

<sup>70</sup> Pidato Wiranto Arismunandar pada acara “Apresiasi dan Pengabdian Guru Besar dan Dosen Senior,” di Departemen Teknik Mesin Aula Timur ITB, tanggal 27 September 2003.

<sup>71</sup> *Kompas*, tanggal 9 Februari 1996.

<sup>72</sup> *Suara Pembaruan*, tanggal 12 Februari 1996.

Rarasati dan Retnowati diminta belajar di Universitas Gajah Mada Yogyakarta (UGM) dan kemudian menjadi guru SMU Negeri untuk mata pelajaran fisika dan matematika.

Wiranto memulai pendidikannya dengan bersekolah di Sekolah Rendah di Jawa Timur. Sekolah menengah pertama dan menengah atasnya juga diselesaikan di Jawa Timur. Prestasi pendidikannya sangat membanggakan. Oleh sebab itu, ayahnya meminta Wiranto untuk melanjutkan ke Universitas Indonesia.<sup>73</sup> ITB masa itu, masih merupakan bagian dari Universitas Indonesia. Arismunandar pun mendorong Wiranto untuk mengambil jurusan teknik mesin.

Ketika menjadi mahasiswa ITB, selama satu semester Wiranto tinggal di Jl. Pajajaran No. 6A, yakni rumah ibu dari Prof. Anton Mulyono. Setelah itu, dia kemudian tinggal di Asrama Mahasiswa Jalan Ganesa 15 B. Di asrama, dia tinggal serumah dengan A. Sadali, Mathias Aroef, Samaun Samadikun, A. Nu'man, Suwarso, Sunardi, Tjokorda Raka, Tungi Ariwibowo, J.C. Kana, Mulhim, Fauzi S, Rochadji Gapar, Jasjfi, Soebhakto, Geert Pandegiro, dan teman-teman lainnya.

Wiranto merasakan kehidupan di asrama mengasyikkan. Ia merasa beruntung dapat berkenalan dan menjalin pertemanan dengan orang yang berasal dari berbagai penjuru tanah air, berbagai ragam budaya, dan kehidupan bertoleransi. Ia senang mempunyai banyak teman. Sebab, pertemanan merupakan bekal paling utama dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>74</sup>

Dalam perjalanan karirnya, ia tidak pernah berpikir untuk menjadi staf pengajar. Prestasinya yang cemerlang, Wiranto lulus ujian sarjana teknik mesin ITB pada 10 Februari 1959. Seorang Ketua Bagian Mesin ITB Prof. Dr. Ing. K.W. Vohdin, kemudian menawarkannya beasiswa belajar ke luar negeri. Tawaran ini tidak pernah diduga, dan langsung direspon cepat oleh Wiranto, dan menyatakan kesediaannya mengabdikan sebagai dosen di almamaternya.<sup>75</sup> Dua bulan sebelum berangkat ke Purdue University Amerika Serikat, pada Juni 1959 Wiranto menikahi Sekarningrum Wirakusumah.

---

<sup>73</sup> Pidato Wiranto Arismunandar pada acara “Apresiasi dan Pengabdian Guru Besar dan Dosen Senior,” di Departemen Teknik Mesin Aula Timur ITB, tanggal 27 September 2003.

<sup>74</sup> *Suara Pembaruan*, tanggal 12 Februari 1996.

<sup>75</sup> *Kompas*, tanggal 9 Februari 1996.

Setamat dari Purdue University, Wiranto menepati janjinya untuk menjadi dosen ITB. Tidak lama berselang, ia berniat melanjutkan studi pascasarjananya. Keinginan itu terwujud pada tahun 1961 untuk belajar di Fakultas Teknik Mesin Stanford University, Amerika Serikat. Wiranto yang cemerlang di bidang akademik, mampu menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1963. Studinya berlanjut dengan mengikuti pelatihan Tenaga Pendorong Pesawat Roket di Jepang pada tahun 1965.

### **Karir Wiranto Aris Munandar**

Prestasi dan latar belakang pengalaman pendidikannya, pada 1973 dia ditetapkan sebagai Guru Besar Termodinamika di ITB. Kemudian, secara berturut-turut, tahun 1978-1989 Wiranto menjadi Wakil Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), tahun 1988-1997 menjadi Rektor di ITB, sejak 1989 menjadi ilmuan senior Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dan sejak 1989 menjadi penasihat ahli PT. Dirgantara Indonesia.<sup>76</sup>



Gambar 1

Wiranto Aris Munandar semasa awal menjadi Guru Besar dan masuk dalam jajaran anggota Senat di Institut Teknologi Bandung.

Sumber: <http://rektorkita.itb.ac.id/galeri>

Semasa menjadi dosen di Teknik Mesin, Wiranto tidak hanya menerapkan ilmu yang sudah dipelajari, tetapi juga melakukan pengembangan-pengembangan

---

<sup>76</sup> Pidato Wiranto Arismunandar pada acara “Apresiasi dan Pengabdian Guru Besar dan Dosen Senior,” di Departemen Teknik Mesin Aula Timur ITB, tanggal 27 September 2003.



teknologi sebagaimana tertulis dalam buku-bukunya. *Pengantar Turbin Gas dan Motor Propulsi*, yang diterbitkan ITB (2002) ditulis sebagai panduan bagaimana merawat turbin gas, baik untuk keperluan industri maupun sebagai penggerak kendaraan darat, kapal dan pesawat terbang. Dia juga menulis *Penggerak Mula Motor Bakar Torak* (ITB, 2002). Buku ini memuat pengetahuan tentang motor bakar torak yang sampai kini masih menempati posisi paling efisien dibandingkan jenis motor bakar lain. Memang, dalam perkembangannya, motor bakar torak dipacu dan teruji oleh tantangan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat yang semakin maju. Dalam karya Wiranto menggarisbawahi, setelah dihadapkan pada masalah bahan bakar minyak, berbagai usaha ditempuh untuk menjadikannya tidak peka terhadap jenis dan kualitas bahan bakar. Maka, faktor pemacu utama di balik perkembangan berikutnya adalah ekologi bukan ekonomi.<sup>77</sup>

Sedangkan buku-buku yang lain yang pernah ditulisnya antara lain: *Termodinamika Teknik; Beberapa Soal dan Penyelesaiannya* (1989), *Penggerak Mula Turbin* (2002), dan *Termodinamika Teknik: Tabel dan Grafik* (2002) yang seluruhnya diterbitkan oleh ITB, sekaligus menjadi diktat resmi dan panduan untuk merawat dan mengembangkan mesin. Umumnya, buku-buku ini ditulis berdasarkan pengalaman Wiranto ketika ia mengajar di Departemen Teknik ITB serta renungannya terhadap masa depan teknologi Indonesia.<sup>78</sup>

Semasa menjabat Rektor ITB, Wiranto beberapa kali mengeluarkan kebijakan yang cukup keras terhadap mahasiswa. Bahkan akibat kebijakannya itu, sepanjang tahun 1989 beberapa kali aksi protes disuarakan di institusi pendidikan yang dipimpinnya.<sup>79</sup> Tidak hanya itu, pada tahun 1990-1994, kembali kebijakan keras dikeluarkan pihak rektorat ITB terhadap mahasiswa.<sup>80</sup>

---

<sup>77</sup> Wiranto Aris Munandar, *Penggerak Mula Motor Bakar Torak*. Bandung: ITB, 2002. Buku ini berguna sebagai pemandu penggunaan supercarjer, sistem penyemprotan bahan bakar pada motor Otto, dan lain-lain yang cukup memberikan gambaran tentang usaha meningkatkan prestasi dan mengurangi emisi gas buang.

<sup>78</sup> Buletin *Mahasiswa Ganesha* No.11/Th.VI, Februari 1994

<sup>79</sup> "Kebijakan Represif Rektor ITB. Catatan Harian Mendikbud: Prof. Ir. Wiranto Arismunandar." dalam mailling list ITB di *ITB@itb.ac.id* tanggal 6 April 1998. *Pertama*, peristiwa 5 Agustus 1989 tentang aksi penolakan kehadiran Mendagri, Rudini di ITB, rektorat menindak 41 mahasiswa, terdiri dari sembilan mahasiswa kena DO, 30 mahasiswa diskorsing selama 1-4 semester, dan empat mahasiswa mendapat peringatan keras. *Kedua*, peristiwa 3 November 1989 yakni demonstrasi menuntut pencabutan SK DO atas peristiwa 5 Agustus. Dalam hal ini rektorat bertindak represif melakukan pemukulan terhadap mahasiswa oleh orang-orang yang tidak dikenal

## Pemikiran Wiranto Aris Munandar Tentang Pendidikan dan Kebudayaan

Bersamaan dengan maraknya aksi unjuk rasa mahasiswa pada bulan Maret 1998, tongkat kepemimpinan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan beralih dari Wardiman Djojonegoro ke Wiranto Arismunandar. Barangkali dari sekian calon menteri yang ditelpon Presiden Soeharto, barangkali hanya Wiranto Aris Munandar yang tidak bergembira saat ditunjuk menggantikan posisi Wardiman Djojonegoro.

Spekulasi kemudian bermunculan saat Wiranto ditunjuk menggantikan posisi Mendikbud Wardiman. Banyak pihak yang menenggarai penunjukan Wiranto merupakan strategi meredam gelombang aksi mahasiswa, menuntut mundurnya Presiden Soeharto. Bila dilihat dari rangkaian kebijakan yang dikeluarkan Wiranto

---

yang dikerahkan rektorat. *Ketiga*, kasus pelanggaran KPM yang dituduh sebagai motor aksi 5 Agustus yang berbuntut pelanggaran KPM di lingkungan ITB. *Keempat*, terjadinya penutupan kampus selama 72 jam oleh rektorat pada bulan Desember 1989. *Kelima*, kasus penutupan Orientasi Studi Keluarga Mahasiswa (OS KM) bagi mahasiswa angkatan 1988. Kegiatan ini dilarang karena ketuanya terlibat peristiwa 5 Agustus, dan rektorat tidak mengizinkan pelaksanaan OS KM. *Keenam*, pelanggaran ITB sebagai sekretariat Badan Koordinasi Mahasiswa Bandung (BKMB). *Ketujuh*, penyegelan sekretariat Program Pengenalan Lingkungan Kampus (PPLK). *Kedelapan*, pencabutan status (DO) mahasiswa Geofisika yang diduga mencatat nomor mobil tugas Bakorstanasda. *Kesembilan*, pelanggaran penggunaan sekretariat PPLK, Grup Apresiasi Sastra (GAS) dan lapangan basket.

<sup>80</sup> Sepanjang tahun 1990 ada beberapa kebijakan pihak rektorat yang dikenakan terhadap mahasiswa ITB, di antaranya penutupan sepihak OS KM 1990 bagi mahasiswa angkatan 1989; skorsing dua mahasiswa karena pelaksanaan Diklatsar Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi (HMTG) 'GEA' 1990 ada salah satu peserta yang masuk ke rumah sakit; pelanggaran foto berjilbab di kartu tanda mahasiswa; dan rektorat menskorsing dua mahasiswa karena terlibat perkelahian dalam pertandingan sepak bola liga ITB. Pada tahun 1991, terjadi dua kebijakan yang merugikan mahasiswa. Pertama, rektorat menskorsing satu mahasiswa karena tidak ijin menggunakan lapangan sepak bola dan fasilitas listrik. Kedua, rektorat melarang berdirinya organisasi Unit Aktifitas Aufklaurung. Tahun 1992 merupakan tahun di mana terjadi banyak peristiwa mengejutkan karena berbagai pergesekan fisik antarorganisasi mahasiswa. *Pertama*, karena perkelahian dan penghinaan terhadap Resimen Mahasiswa (MENWA) rektorat menskorsing dua mahasiswa selama 1 semester. *Kedua*, rektorat menskorsing tujuh mahasiswa karena terlibat adu fisik antara panitia dan peserta Penerimaan Anggota Himpunan Mahasiswa Planologi. *Ketiga*, rektorat tidak mengizinkan acara *Open House* Unit-Unit Aktifitas Mahasiswa ITB. *Keempat*, rektorat tidak mengizinkan berdirinya Unit Aktifitas Bantuan Teknologi ITB. *Kelima*, rektorat memberikan sanksi kepada empat mahasiswa yang berteriak saat ceramah P4. *Keenam*, rektorat menerbitkan buku Peraturan-Peraturan ITB dalam 3 jilid yang mengatur semua aktifitas mahasiswa. Akan diberikan sanksi bagi yang melanggar peraturan ini. Pada tahun 1996, terjadi pula beberapa kebijakan yang cenderung represif dan merugikan para dosen dan mahasiswa. *Pertama*, penghentian kontrak kerja tiga asisten dosen secara sepihak karena ketiga asisten dosen tersebut hadir dalam Penerimaan Anggota Baru Ikatan Mahasiswa Arsitektur-Gunadarma ITB. *Kedua*, rektorat melarang terbitnya bulletin Ganesha karena dinilai melanggar kode kehormatan dan peraturan dalam terbitannya edisi khusus April rektorat memaksa kepada 22 Himpunan Mahasiswa ITB untuk mengubah AD/ARTnya. Lihat dalam *Kompas*, tanggal 9 Februari 1996; *Suara Pembaruan*, tanggal 12 Februari 1996; dan *Pikiran Rakyat*, tanggal 24 April 1996.

semasa menjabat Rektor ITB tahun 1989-1996, tampak bahwa dirinya merupakan orang yang keras, tegas, dan tak segan-segan memberikan skorsing bagi mahasiswa yang membandel.



Gambar 2 Wiranto Aris Munandar semasa awal menjadi Guru Besar dan masuk dalam jajaran anggota Senat di Institut Teknologi Bandung.

Sumber: <http://jatinangor.itb.ac.id/wp-content/uploads/2015/03/Presentasi-ITB-2015-revisi.pdf>.

Acara serah terima jabatan dari Wardiman ke Wiranto Aris Munandar berlangsung pada Rabu tanggal 18 Maret 1998. Dengan suara tegas, dalam pidato sambutannya Wiranto menyampaikan beberapa kebijakan penting yang akan ditempuhnya. Pertama, pentingnya menyukseskan program wajib belajar sembilan tahun. Kedua, upaya memajukan dunia riset dengan pengalokasian anggaran yang wajar. Ketiga, meneruskan program menteri sebelumnya, yakni program *link and match*. Program ini merupakan agenda untuk mengenalkan secara lebih dalam dunia pendidikan dan dunia kerja. Dimaksudkan agar selepas menyelesaikan pendidikan, seorang mahasiswa dapat beradaptasi secara baik dengan dunia lapangan pekerjaan.<sup>81</sup>

Selama kurang lebih 60 hari menjabat sebagai menteri, tentu saja program dan gagasan Wiranto kurang berjalan optimal. Hal ini dapat dimengerti, sebab medio Maret-Mei 1998 merupakan periode yang sangat krusial dalam langgam politik-ekonomi Indonesia. Di satu sisi, Indonesia sedang dihadapkan pada krisis ekonomi

---

<sup>81</sup> Majalah *D&R*, 28 Maret 1998.

yang luar biasa pengaruhnya terhadap segala sektor kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Di sisi lainnya, gelombang demonstrasi mahasiswa untuk menuntut pergantian kekuasaan semakin intens dan menemukan titik kulminasinya pada pertengahan bulan Mei.

Dalam kurun waktu itu pula, sebagai menteri pendidikan, Wiranto disibukkan dengan pekerjaan untuk berkomunikasi dengan jajaran rektor dan pemimpin universitas di seluruh Indonesia. Boleh jadi, hal tersebut adalah perintah Presiden Soeharto dalam rangka meredam demonstrasi mahasiswa yang marak di seluruh daerah. Alhasil, sejarah mencatat tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri sebagai presiden. Keadaan semakin tidak menentu. Krisis tetap berlanjut, sementara pucuk pimpinan nasional diserahkan kepada Wakil Presiden, yakni Habibie. Dengan demikian, karir, gagasan, pemikiran dan cita-cita Wiranto untuk memajukan dunia pendidikan pun ikut tenggelam bersama riuh rendah Reformasi 1998.